KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I_2024

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kerjasama dari semua pihak yang terkait lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 yang tertuang dalam pelaksanaan program kerja sebagai upaya pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Laporan ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kegiatan lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon melalui program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 oleh setiap bagian di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Laporan kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Ambon, 24 April 2024

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON
PERIKANAN BUDIDAYA
REPUBLIK INDONESIA

Sarwono

Daftar ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Gambar v
Daftar Grafik vi
Daftar Tabel .....
Ringkasan Eksekutif 1
I. Pendahuluan 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Maksud dan Tujuan 5
1.3. Tugas dan Fungsi 5
1.4. Sumberdaya Manusia 7
1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja 8
1.6. Sistematika Penyajian Laporan 10
II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja 11
2.1 Visi 11
2.2 Misi Presiden 12
2.3 Arahan Utama Presiden 12
2.4 Kebijakan dan Strategi KKP 13
2.5 Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon 14
2.5.1. Dukungan Anggaran 16
2.6 Penetapan Kinerja 16
2.7 Pengukuran Kinerja 25
III. Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan 27
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 27
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja 30
3.2.1. Sasaran kegiatan I, Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 30
3.2.2. Sasaran Kegiatan II, Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 32
3.2.3. Sasaran Kegiatan III, Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan KesehatanIkan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 54
3.2.4. Sasaran kegiatan IV, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 60

3.3. Akuntabilitas Keuangan 81
3.4.Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran 85
3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran 85
IV. Penutup 87
4.1. Simpulan 87
4.2. Permasalahan/Kendala yang dihadapi 87
4.3. Langkah Perbaikan 87
V. Lampiran 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon Th. 2024 6
Gambar 2. NPSS 2024 25
Gambar 3. Produksi Planlet Rumput Laut 34
Gambar 4. Kegiatan identifikasi kelompok calon penerima bantuan sarana KBRL 38
Gambar 5. Bibit rumput laut kultur jaringan 40
Gambar 6. Calon induk Ikan kakap putih (*Lates calcarifer*) 42
Gambar 7. Kegiatan penyaluran bantuan benih ikan 46
Gambar 8. Calon induk Ikan Kuwe (*Caranx* sp) 48
Gambar 9. Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan 50
Gambar 10. Bantuan Benih Ikan Hias Laut 2024 53
Gambar 11. Diagram Kejadian Penyakit Ikan 55
Gambar 12. Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon 57
Gambar 13. Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN 62
Gambar 14. Sertifikat Kegiatan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN 62
Gambar 15. Penilaian WBK dalam Aplikasi E-Zi 70

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2024	7
Grafik 2.	Pendidikan Pegawai (PNS dan PPPK) Lingkup BPBL Ambon 2024	8
Grafik 3.	Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2024	8
Grafik 4.	Perbandingan Capaian IKU PNBP Satker Laut	31
Grafik 5.	Capaian IKU Produksi Bibit Rumput Laut Satker Laut	34
Grafik 6.	Capaian IKU Bantuan KBRL Satker Laut	39
Grafik 7.	Capaian IKU Bantuan Calon Induk Laut Satker Laut	42
Grafik 8.	Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut	44
Grafik 9.	Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut	47
Grafik 10.	Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Hias Laut	53
Grafik 11.	Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut	56
Grafik 12.	Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut	59
Grafik 13.	Capaian IKU IP ASN Satker Laut	63
Grafik 14.	Capaian Persentase Penyelesaian LHP BPK Satker Laut	73
Grafik 15.	Capaian IKU Rekomendasi Pengawasan Satker Laut	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon	14
Tabel 2.	Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2024	16
Tabel 3.	Keselarasan Renstra dan PK Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon TA. 2024	23
Tabel 4.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	27
Tabel 5.	Capaian IKU Nilai PNBP BPBL Ambon Tahun 2024	30
Tabel 6.	Capaian IKU Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT	33
Tabel 7.	Rincian Bahan Konstruksi 1 (satu) Unit Kebun Bibit Rumput Laut	36
Tabel 8.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara	37
Tabel 9.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara	37
Tabel 10.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat	37
Tabel 11.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kota Tual Provinsi Maluku	37
Tabel 12.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara	38
Tabel 13.	Capaian IKU Bantuan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Rumput Laut BPBL Ambon	38
Tabel 14.	Capaian IKU Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat	41
Tabel 15.	Capaian IKU Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	43
Tabel 16.	Rincian Bantuan Benih Ikan Laut	43
Tabel 17.	Capaian IKU Produksi Calon Induk Ikan Laut yang diproduksi BPBL Ambon	46
Tabel 18.	Rincian Produksi Calon Induk Unggul	47
Tabel 19.	Rencana Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya tahun 2024	49
Tabel 20.	Capaian IKU Layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya Bidang Pembesaran Ikan	50
Tabel 21.	Capaian IKU Bantuan Sarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok BPBL Ambon	51

Tabel 22. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Hias Laut BPBL Ambon 52
Tabel 23. Capaian IKU Prasarana Produksi yang direhabilitasi BPBL Ambon 54
Tabel 24. Capaian IKU Sampel yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBL Ambon 56
Tabel 25. Capaian IKU Sampel yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBL Ambon 59
Tabel 26. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN BPBL Ambon 60
Tabel 27. Deskripsi Tone Berita 65
Tabel 28. Capaian IKM Rasio Jumlah Pemberitaan Netral positif terhadap Total Pemberitaan Sektor Perikanan Budidaya 65
Tabel 29. Capaian IKM Pengawasan kearsipan BPBL Ambon 66
Tabel 30. Capaian IKM Indeks Pengelolaan Kepegawaian 67
Tabel 31. Capaian IKM Pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA 68
Tabel 32. Capaian IKM Nilai consensus ZI lingkup BPBL Ambon 70
Tabel 33. Capaian IKM Persentase Penyelesaian LHP BPK lingkup BPBL Ambon 72
Tabel 34. Capaian IKM Nilai Rekon Kinerja lingkup BPBL Ambon 73
Tabel 35. Capaian IKM Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Ambon 75
Tabel 36. Capaian IKM Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBL Ambon tahun 2024 77
Tabel 37. Capaian IKM Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBL Ambon 78
Tabel 38. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa BPBL Ambon 79
Tabel 39. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPBL Ambon 80
Tabel 40. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Tahun 2024 dan 2023 81
Tabel 41. Data realisasi anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas 81
Tabel 42. Efisiensi Anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas 84

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (BPBL Ambon) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan perairan disekitarnya. Lingkup wilayah kerja BPBL Ambon meliputi wilayah Maluku, Sulawesi, Papua dan Papua Barat. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas yakni mencakup indonesia bagian timur, secara langsung berdampak pada besarnya tanggung jawab yang diemban dengan tugas pokok dalam hal budidaya laut dimana BPBL Ambon dituntut mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di bidang perikanan budidaya laut guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan kegiatan budidaya laut di wilayah kerja melalui peningkatan kinerja dan kebijakan program yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 ini merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BPBL Ambon. Laporan Kinerja adalah dokumen evaluasi untuk mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBL Ambon dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Pada tahun 2024, BPBL Ambon menetapkan 4 sasaran kegiatan dan 25 indikator kinerja utama. Masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balai. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budiddaya Laut Ambon pada tahun 2024, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 33.724.991.000 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DIPA Nomor-032.04.2.567720/2024 tanggal 24 November 2023. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Maret tahun 2024 sebesar Rp. 8.999.139.255 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau 26,68% dari total pagu anggaran. Proses pencapaian Indikator kinerja utama pada tahun 2024 IKU utama telah dicapai dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah penjabaran persentase capaian IKU sampai dengan Maret tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. IKU nilai PNBP lingkup BPBL Ambon tercapai Rp. 169.655.009 atau 17,51% dari target tahunan.

2. IKU Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat tercapai 64,79% dari target tahunan.
3. Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan (%) perhitungan akan dilakukan pada akhir semester pertama
4. Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat (%), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester pertama
5. Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat tercapai 66,34% dari target tahunan.
6. Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor), tercapai 181 ekor pada akhir triwulan pertama.
7. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 110% dari target tahunan.
8. Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat (%), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
9. Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat (%) perhitungan akan dilakukan pada akhir semester pertama
10. Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi (Unit), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
11. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (%), tercapai 58,93 % pada akhir triwulan pertama.
12. Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (%) tercapai 34,29 % pada akhir triwulan pertama.
13. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester pertama
14. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai) perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
15. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (%) perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
16. Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (%), tercapai 100% pada akhir triwulan pertama.
18. Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon perhitungan akan dilakukan pada akhir semester pertama
19. Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua

20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
22. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tercapai 100% pada akhir triwulan pertama
23. Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks) perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
24. Indeks Pengelolaan Kepegawaian, perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua.
25. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua.

Beberapa Indikator Kinerja Utama lingkup BPBL Ambon pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyusunan perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan teknis di lapangan sehingga proses ketercapaian kinerja 2024 dapat dilaksanakan dengan baik.

Tindak lanjut penerapan rekomendasi adalah penyusunan target perencanaan kinerja di 2024 harus disusun sebaik mungkin dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis dimulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan prioritas yang sesuai dengan tusi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, telah mengamanatkan agar melakukan pembangunan berbagai bidang secara berkelanjutan. Fokus RPJMN 2020 – 2024, yaitu memantapkan pembangunan keunggulan kompetitif berbasis SDA, SDM Berkualitas, dan Kemampuan IPTEK sehingga diharapkan dapat terwujud : (i) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas; (ii) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (iii) meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan (iv) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (v) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (vi) membangun lingkaran hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (vii) memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Sesuai dengan arahan RPJMN tersebut, selama kurun waktu tahun 2020-2024, fokus kebijakan pembangunan perikanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut : (i) teknologi produksi melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) Sosial Ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; dan (iii) Keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan dan memperhatikan daya dukung lingkungan dan (iv) berorientasi pasar, perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Arah kebijakan perikanan budidaya tersebut dengan potensi dan keunggulan karakteristik yang ada, diyakini mampu memberi kontribusi pada 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional pemerintah (NAWACITA), diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi (termasuk pembudidaya ikan), serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budidaya yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Adapun strategi yang ditempuh untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut : (i) Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan; (ii) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan ; dan (iii) Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Renstra dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengatasi tantangan

global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja antara lain :

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kepada seluruh *stakeholders;*
2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Perikanan Budididaya Laut Ambon pada triwulan pertama tahun anggaran 2024 dalam upaya perbaikan kinerja atas tahun sebelumnya; dan sebagai bahan inputan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 6/PERMEN-KP/2014 yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi system perikanan budidaya laut;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis budidaya laut;
6. Pengelolaan dan pelayanan system informasi dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi perikanan budidaya laut;

10. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menjadi Eselon IIIa dengan struktur organisasi terdiri atas:

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, tersaji pada gambar dibawah ini :

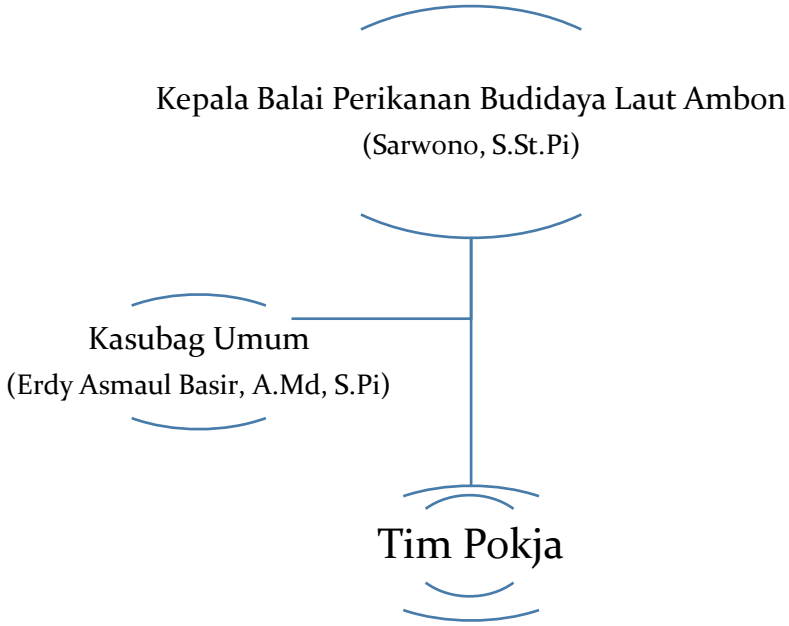

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon Th. 2024

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 1 Kasubag Umum, kelompok jabatan fungsional dan seluruh pegawai yang berjumlah 62 orang dengan kompetensi yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan tercapainya kinerja yang akuntabel.

Adapun tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi BPBL Ambon adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana,

kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerekayasaan, pengujian, pendampingan, penerapan standar/sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan benih/budidaya serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari : Analis Akuakultur, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengelola Kesehatan Ikan, Statistisi, dan Pranata Humas.

Selain 2 bagian utama yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan SK Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon No. 05/Kpts/BPBLA/OT.210/I/2022 tentang Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 2022 terdiri dari 4 divisi yakni:

1. Divisi Produksi Benih Ikan Konsumsi
2. Divisi Produksi Calon Induk dan Rumput Laut
3. Divisi Produksi Benih Ikan Hias Laut
4. Divisi Pengelolaan Laboratorium

1.4. Sumberdaya Manusia

Jumlah Pegawai BPBL Ambon pada tahun 2024 terdiri dari 62 ASN (PNS dan PPPK) serta tenaga kontrak yang diuraikan sebagai berikut :

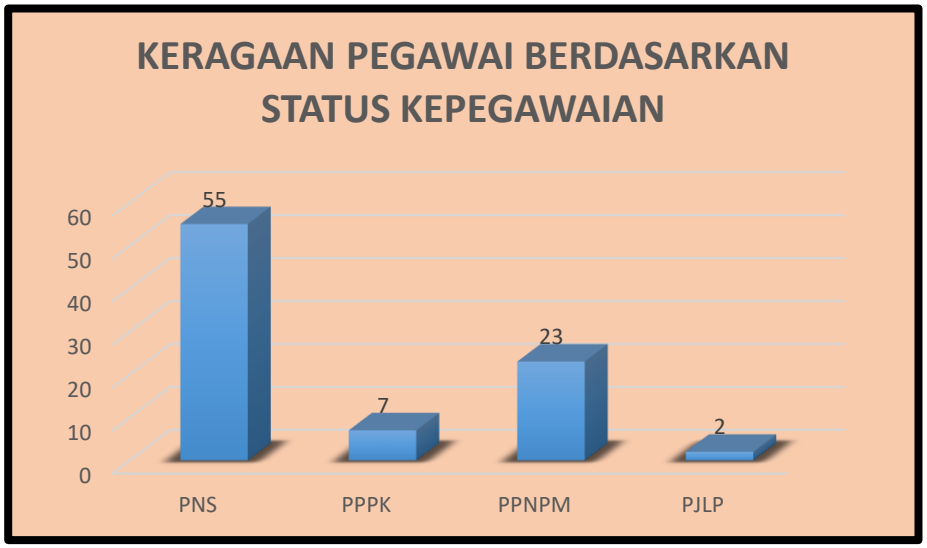

Grafik 1. Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2024

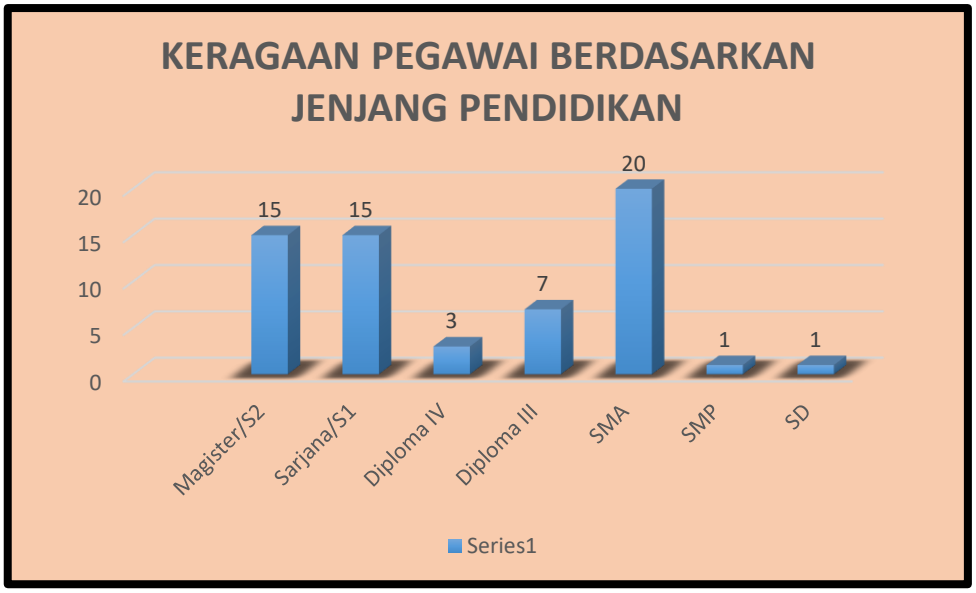

Grafik 2. Pendidikan Pegawai (PNS dan PPPK) Lingkup BPBL Ambon 2024

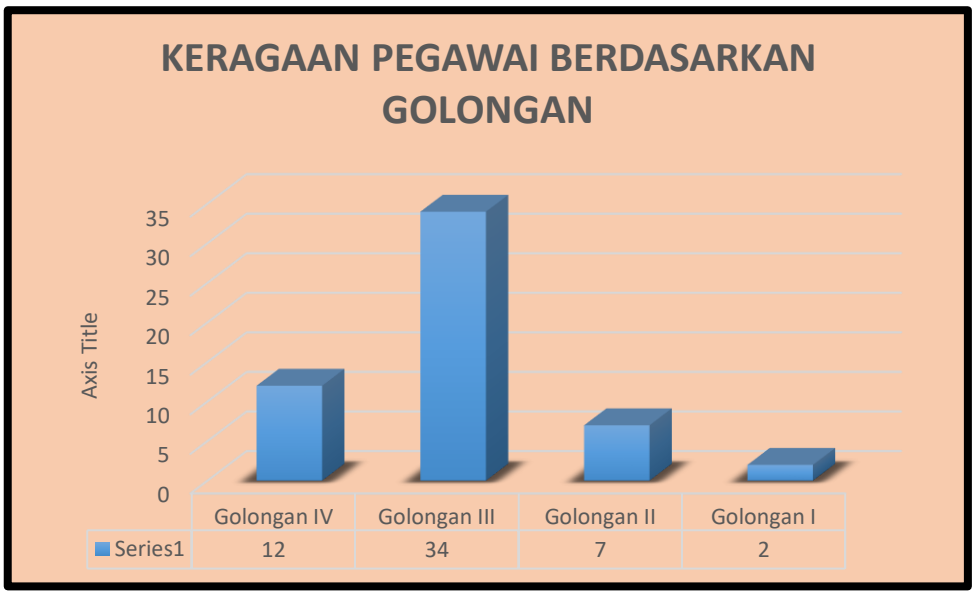

Grafik 3. Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2024

1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja

Pengembangan budidaya laut atau dikenal dengan Marikultur terus dikembangkan. Didukung dengan potensi yang cukup besar, marikultur juga dinilai akan dapat berkontribusi banyak untuk mendorong Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Secara umum data produksi perikanan budidaya pada 2024 ditargetkan 24,85 juta ton, dimana produksi ikan dan udang sebesar 12,5 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton, dan ikan hias 1,64 Miliar ekor. Pengembangan kegiatan marikultur di wilayah kerja juga terus dilakukan guna mendukung

peningkatan nilai produksi nasional khususnya produksi komoditas unggulan laut yang dikembangkan sampai saat ini.

Maluku menjadi salah satu provinsi kepulauan dengan potensi laut yang cukup besar, data menunjukan potensi laut Maluku dapat mencapai 3,9 Juta ton dengan estimasi nilai perolehan sekitar Rp. 117 Triliun. Dengan kekayaan laut yang melimpah, sektor perikanan laut berpeluang besar dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam hal pengembangan budidaya laut di Maluku memiliki beberapa komoditas unggulan. Komoditas unggulan yang dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis penting antara lain beberapa jenis ikan kerapu, ikan kakap putih, dan ikan bubara atau Ikan Kuwe. Selain ikan konsumsi, ikan hias juga menjadi sektor andalan pengembangan budidaya. Ikan clownfish atau ikan badut atau banyak dikenal ikan nemo telah menjadi salah satu primadona komoditas ikan hias laut yang dibudidayakan. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon saat ini telah mampu mengembangkan teknologi budidaya ikan hias clownfish dengan melakukan hybridisasi induk sehingga diperoleh varian yang beraneka ragam corak dan warna, tercatat lebih dari 50 varian clownfish yang telah dihasilkan dan memiliki nilai jual tinggi dipasaran.

Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga tengah fokus dalam mengembangan komoditas unggulan rumput laut. Budidaya rumput laut menggunakan teknik kultur jaringan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan produksi rumput laut di Indonesia. Teknik ini telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tujuan untuk menggenjot produksi rumput laut dan memperbaiki kualitas bibit rumput laut yang ada di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan produksi rumput laut, KKP juga telah membangun kawasan-kawasan sentra budidaya rumput laut di beberapa daerah seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kawasan-kawasan ini sepenuhnya menggunakan bibit rumput laut hasil dari kultur jaringan.

Bibit rumput laut hasil kultur jaringan juga telah disalurkan kepada kelompok pembudidaya dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil produksi rumput laut secara keseluruhan. Dengan penerapan teknik kultur jaringan, diharapkan produksi rumput laut di Indonesia dapat terus meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen rumput laut nomor satu di dunia.

Beberapa isu dan permasalahan dalam pengembangan budidaya laut di wilayah timur Indonesia antara lain:

1. Penyediaan, distribusi induk dan benih berkualitas masih terbatas;
2. Mahalnya biaya pakan dalam budidaya;
3. Ancaman infeksi penyakit;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan budidaya sehingga berdampak rendahnya nilai produksi

5. Implementasi konsep biosecurity yang belum memadai sehingga intensitas infeksi penyakit pada ikan budidaya masih terus terjadi;
6. Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya di wilayah kerja
7. Masih rendahnya akses pasar yang menunjang pemasaran produk budidaya, dan
8. Akses permodalan bagi pembudidaya masih rendah

1.6. Sistematika Penyajian Laporan kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini disajikan ringkasan mengenai tujuan, sasaran, capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta antisipasi untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi dari Balai Perikanan Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan Laporan kinerja.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahun 2024 dan indikator keberhasilan pencapaian penetapan kinerja berupa target program prioritas.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK), evaluasi dan analisis capaian kinerja termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target serta hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan di tahun sebelumnya. Serta akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala serta upaya tindak lanjut untuk perbaikan tahun mendatang.

Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Arahan utama Presiden yang kemudian disinkronkan dengan 7 agenda pembangunan RPJMN tahun 2022-2024, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

2.1. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk visi pembangunan nasional 2020-2024 menggunakan Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Sedangkan visi KKP 2020 – 2024 adalah “Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020 – 2024 yang sejalan dengan visi presiden, wakil presiden dan KKP adalah “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumberdaya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

2.2. Misi Presiden

Visi di atas dapat diwujudkan dengan pelaksanaan Misi Presiden dalam Nawacita II, antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon bertanggung jawab untuk membantu dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan budidaya laut di lingkup wilayah kerjanya adapun visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh BPBL Ambon sejalan dengan visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya yang mengacu pada visi misi presiden dan wakil presiden 2020 – 2024. Penerapan dan pelaksanaan visi misi dilakukan secara bertanggungjawab didasari sikap gotong royong, yang saling mendukung memberi manfaat dan memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi bagi kepentingan stakeholder perikanan budidaya.

2.3. Arahan Utama Presiden

Misi Presiden di atas diimplementasikan melalui 5 Arahan Utama Presiden yang disampaikan pada Pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019, antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai IPTEK, mengundang talenta global untuk bekerjasama, mengembangkan *endowment fund* untuk manajemen SDM, serta optimalisasi kerjasama dengan industry
2. Pembangunan Infrastruktur, Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi, Kendala regulasi disederhanakan, dipotong dan dipangkas dengan pendekatan *omnibus law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang dan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.4. Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Isu strategis dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan, diantaranya adalah (1) Pemberantasan perikanan ilegal, tanpa pelaporan, dan tak diatur (*IUU fishing*), (2) Keberlanjutan (*sustainability*) Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, (3) Peningkatan kesejahteraan (*prosperity*) masyarakat, (4) Meningkatan daya saing industri perikanan, (5) Pengembangan SDM dan IPTEK Kelautan dan Perikanan, (6) Pembangunan Sumber Daya Kelautan (KKP 2019).

Ada 2 arahan Presiden untuk pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu: memperbaiki hubungan dengan *stakeholders* dan perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat lagi (KKP 2019).

Kebijakan pokok pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dapat menyerap lapangan pekerjaan dan meningkatkan devisa negara, yaitu melalui delapan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM yang unggul
2. Pemberdayaan dan perlindungan usaha
3. Pengelolaan SDKP yang berkelanjutan
4. Peningkatan pengawasan SDKP
5. Industrialisasi kelautan dan perikanan
6. Peningkatan usaha dan investasi
7. Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan yang faktual dan komunikasi dengan *stakeholders*
8. Reformasi birokrasi (KKP 2019).

Untuk melaksanakan kebijakan diatas maka strategi yang berkaitan dengan perikanan budidaya adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dan perlindungan usaha
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan

- Pengelolaan kawasan perikanan budidaya berkelanjutan
- Optimalisasi produksi perikanan budidaya
- Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya

3. Peningkatan usaha dan investasi KP
4. Penguatan kebijakan regulasi berbasis data dan informasi
5. Reformasi Birokrasi

Rumusan rencana strategis ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBL Ambon. Penetapan tujuan adalah hal yang penting sebagai dasar penentuan arah strategis dan perubahan serta perbaikan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, yaitu mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan BPBL Ambon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan, khususnya di wilayah kerja BPBL Ambon, mencakup kegiatan produksi calon induk, benih dan rumput laut kultur jaringan unggul.
2. Tersedianya paket teknologi budidaya laut yang mampu diterapkan oleh masyarakat pembudidaya;
3. Terselenggaranya kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan dalam menunjang pengembangan kawasan budidaya laut yang menerapkan system usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

2.5. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

Mengacu pada sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya 2020 – 2024 sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan ditetapkan melalui tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang terbagi menjadi empat perspektif dalam bentuk peta sasaran strategis BPBL Ambon.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
• Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	• Nilai PNBP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Rp)
• Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	• Persentase bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat (%). • Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)

	• Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) • Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) • Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor) • Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen) • Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen) • Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) • Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)
• Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	• Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen) • Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (Persen)
• Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	• Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks) • Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai) • Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen) • Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) • Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen) • Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

	• Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Ratio pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks) • Indeks Pengelolaan Kepegawaian • Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)

2.5.1. Dukungan Anggaran

Dalam mendukung terlaksananya perencanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 33.724.991.000 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Berikut adalah komposisi penganggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024:

Tabel 2. Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2024

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	6.529.664.000
2.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	10.280.000.000
3.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.825.853.000
4.	Dukungan Internal lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	15.089.474.000
Total Anggaran BPBL Ambon Tahun 2024		**33.724.991.000**

2.6. Penetapan Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pasca automatic adjustment tahun 2024, adalah sebagai berikut:

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
Tb. Haeru Rahayu	**Sarwono**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	1.	Nilai PNBP Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah)	968.400.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5.	Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		6.	Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	4090
		7.	Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	100
		8.	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	75
		9.	Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		10.	Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	1
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	11.	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100
		12.	Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	85
		14.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		15.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)	100
		16.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	82
		17.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)	80
		18.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	86
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		22.	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	86
		23.	Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		24.	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		25.	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
Tb. Haeru Rahayu	Sarwono

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	6.529.664.000
2.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	11.000.000.000
3.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.825.853.000
4.	Dukungan Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	15.089.474.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon Tahun 2024		**34.444.991.000**

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
Tb. Haeru Rahayu	**Sarwono**

Tabel 3. Keselarasan Renstra dan PK Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon TA. 2024

No.	Sasaran kegiatan 2023	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja (IKU)	Renstra	Realiasasi 2023	Target 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)	958.400.000	1.057.818.530	968.400.000	Penyesuaian Target Perolehan PNBP pada tahun 2024
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	40.000	0	75%	Merupakan IKU Baru pada tahun 2024
			Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	20	100%	75%	Penyesuaian target IKU pada tahun 2024
			Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	-	150%	75%	Merupakan IKU baru pada tahun 2024
			Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)		118,30%	75%	Penyesuaian target IKU pada tahun 2024
			Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	2200	155,33%	4090	Penyesuaian target IKU pada tahun 2024
			Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	-	100%	100%	Penyesuaian target IKU pada tahun 2024
			Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	10	100%	75%	Penyesuaian target IKU pada tahun 2024
			Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	-	106%	75%	Penyesuaian target IKU pada tahun 2024
			Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	-	1	1	Tidak ada perubahan IKU di 2024
4.	Meningkatnya kualitas pengendalian kawasan dan kesehatan Ikan	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	1950	210,32%	100%	Perubahan klausa sasaran kegiatan dan satuan perhitungan dimana pada tahun 2022 IKU ini memliki satuan sampel, pada tahun 2024 menjadi Persentase
			Persentase sampel Survaillance Resistensi Antimikroba yang	-	152,94%	100%	Merupakan IKU baru pada tahun 2024

			diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)				
5.	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	72	91,34	85	Penyesuaian target IKU
			Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	76	79,78	76	Perubahan satuan perhitungan dimana pada tahun 2022 IKU ini memliki satuan unit, pada tahun 2024 menjadi Indeks Nilai
			Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100	100	100	Belum ada perubahan IKU
			Nilai PM SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	85	72,95	82	Penyesuaian target IKU
			Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	60	100	80	Penyesuaian target IKU
			Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	88	93,30	93,76	Belum ada perubahan IKU
			Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	85	88,38	86	Penyesuaian target IKU
			Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	-	82,23	80	Penyesuaian target IKU
			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	-	77,90	80	Penyesuaian target IKU
			Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan	-	100%	86	Perubahan jenis perhitungan dimana pada tahun 2022 IKU ini memliki perhitungan minimaze,

			Budidaya Laut Ambon				pada tahun 2024 menjadi maximaze
			Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks)	-	85,03	75	Belum ada perubahan IKU
			Indeks Pengelolaan Kepegawaian	-	4	4	IKU tetap di 2024
			Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	-	84,21%	80	Merupakan IKU Baru 2024

2.7. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, BPBL Ambon menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim *Strategic Management Office* (Tim Pengelola Kinerja BPBL Ambon) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat;
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
3. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.

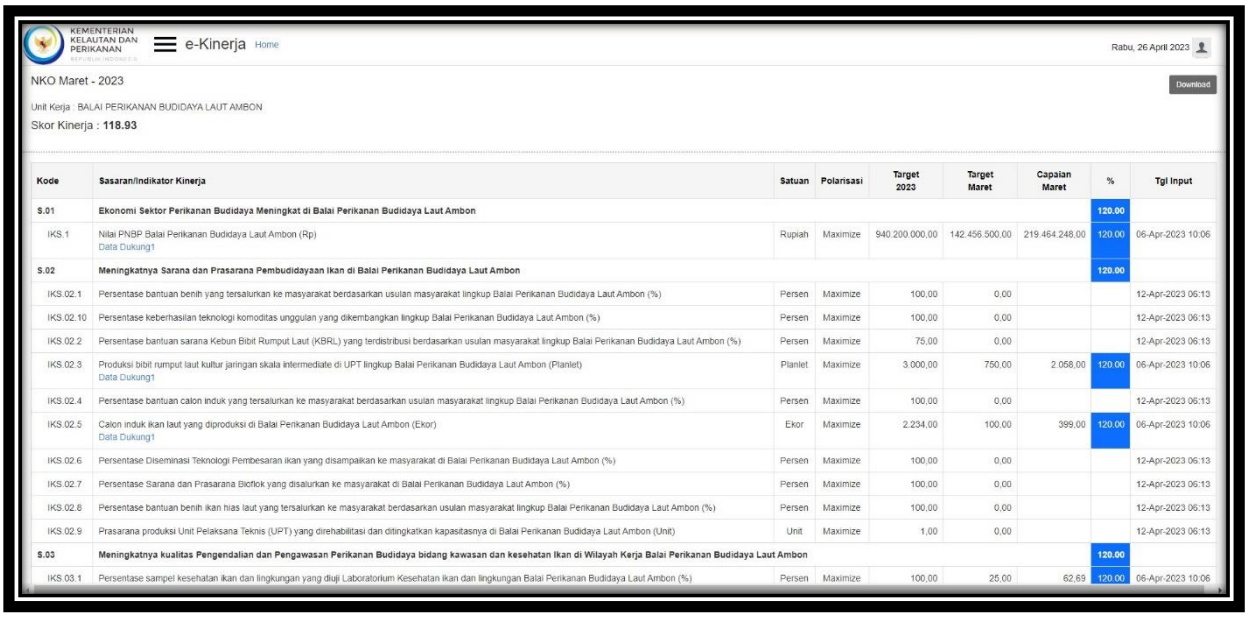

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2023	Target Maret	Capaian Maret	%	Tgl Input
S.01	**Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon**						120.00	
IKS.1	Nilai PNBP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Rp) Data Dukung1	Rupiah	Maximize	940.200.000,00	142.456.500,00	219.464.248,00	120.00	06-Apr-2023 10:06
S.02	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon**						120.00	
IKS.02.1	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	Persen	Maximize	100,00	0,00			12-Apr-2023 06:13
IKS.02.10	Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	Persen	Maximize	100,00	0,00			12-Apr-2023 06:13
IKS.02.2	Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	Persen	Maximize	75,00	0,00			12-Apr-2023 06:13
IKS.02.3	Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Planlet) Data Dukung1	Planlet	Maximize	3.000,00	750,00	2.058,00	120.00	06-Apr-2023 10:06
IKS.02.4	Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	Persen	Maximize	100,00	0,00			12-Apr-2023 06:13
IKS.02.5	Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor) Data Dukung1	Ekor	Maximize	2.234,00	100,00	399,00	120.00	06-Apr-2023 10:06
IKS.02.6	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	Persen	Maximize	100,00	0,00			12-Apr-2023 06:13
IKS.02.7	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	Persen	Maximize	100,00	0,00			12-Apr-2023 06:13
IKS.02.8	Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	Persen	Maximize	100,00	0,00			12-Apr-2023 06:13
IKS.02.9	Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Unit)	Unit	Maximize	1,00	0,00			12-Apr-2023 06:13
S.03	**Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan dan kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon**						120.00	
IKS.03.1	Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	Persen	Maximize	100,00	25,00	62,69	120.00	06-Apr-2023 10:06

Gambar 2. NPSS 2024

Polarisasi data menunjukkan ekspektasi (harapan) arah nilai aktual/realisasi dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target.

1. ***Maximize***: Semakin tinggi nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.

Contoh polarisasi data *maximize*.

2. ***Minimize***: Semakin rendah nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.

Contoh polarisasi data *minimize*.

3. ***Stabilize***: Capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual/realisasi IKU mendekati target dalam suatu rentang tertentu.

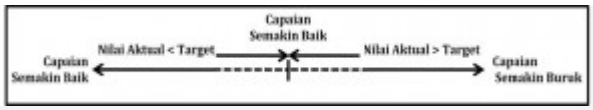

Contoh polarisasi data *stabilize*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian IKU, bab ini menguraikan tentang indikator kinerja kegiatan, penjelasan tentang capaiannya, kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya termasuk langkah antisipasi yang dilakukan pada tahun berjalan.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)	968.400.000	150.519.128	169.655.009	Capaian IKU ini mencapai 112,71% pada triwulan pertama 2024
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Presentase Bantuan bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat (%)	75%	60%	64,79%	Capaian IKU ini mencapai 107,98% pada triwulan pertama 2024
		Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara semester
		Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara semester
		Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	50%	66,34%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada triwulan pertama 2024
		Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan	4090	100	181	Capaian IKU ini mencapai 120% pada triwulan pertama 2024

		Budidaya Laut Ambon (Ekor)				
		Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100% 4 Lokasi	100%	110%	Capaian IKU ini mencapai 110% pada triwulan pertama 2024
		Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawat dan Laut yang Dimanfaatkan (%)	100%	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat (%)	100%	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Unit)	100%	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
4.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan dan kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase Layanan Pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	25	58,93	Capaian IKU ini mencapai 120% pada triwulan pertama 2024
		Persentase sampel Survaillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	25	34,29	Capaian IKU ini mencapai 120% pada triwulan pertama 2024
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	85	-		Capaian IKU ini dihitung secara semester
		Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	86%	100%	100%	Capaian IKU ini mencapai 116% pada triwulan pertama 2024

		Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks)	75	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Indeks Pengelolaan Kepegawaian	4	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	80	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	76	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Nilai PM SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	82	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	80	80	100	Capaian IKU ini mencapai 120% pada triwulan pertama 2024
		Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	93,76	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara semester
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	86	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	80	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	80	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Bagian berikut menguraikan tentang evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan dan analisis capaian kinerja dari sasaran kegiatan.

SASARAN KEGIATAN I : EKONOMI SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENINGKAT DI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

IKU 1 : Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)

PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan. Kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi:

- Penerimaaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
- Penerimaan dari pemanfaatan sumberdaya alam
- Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Tabel 5. Capaian IKU "Nilai PNBP BPBL Ambon Tahun 2024.

Sasaran Kegiatan : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
150.519.128	169.655.009	112,71	219.464.248	77,24	968.400.000	17,52	17,69

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPBL Ambon Tahun 2024 adalah sebesar Rp 968.400.000. dan terealisasi sebesar Rp. 169.655.009 atau sebesar 17,52 % terhadap target tahun 2024. Capaian PNBP tersebut diperoleh dari penjualan hasil perikanan, pendapatan jasa lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya Rp. 136.003.000,
2. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI Rp. 600.000,
3. Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya Rp. 3.120.000,
4. Sewa Rumah Dinas Rp. 10.819.116,
5. Pendapatan non anggaran Rp. 11.375.400,

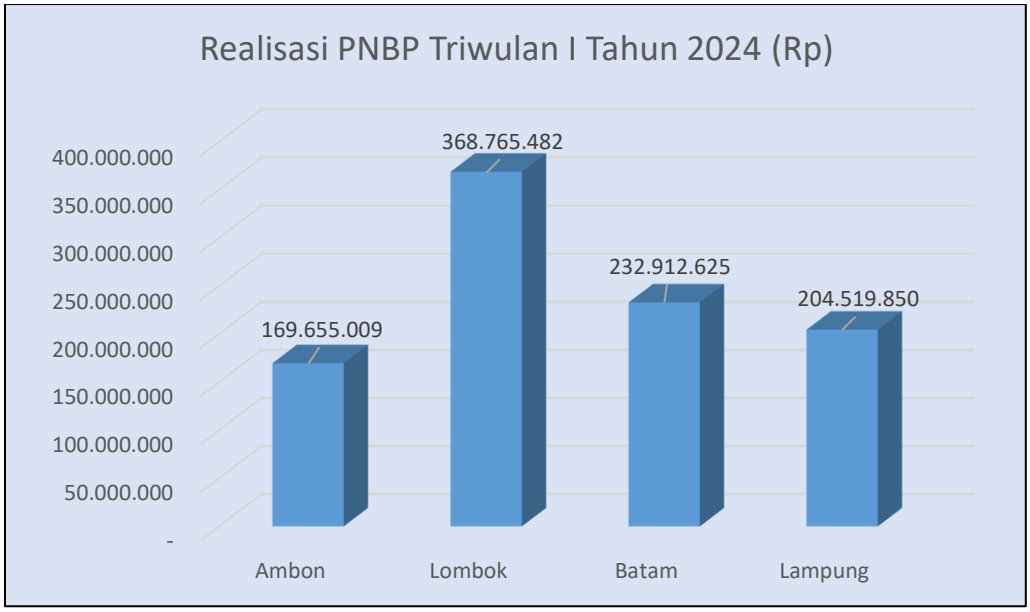

Grafik 4. Perbandingan Capaian IKU PNBP Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian PNBP pada 4 (Empat) satker laut yakni Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada triwulan pertama tahun 2024 bervariasi, hal ini tentunya disebabkan perbedaan target yang diterima yang ditetapkan dalam PK Balai, selain itu perbedaan jenis komoditas yang dikembangkan setiap balai memiliki karakteristik yang berbeda, selera pasar dan konsumen yang berbeda juga akan berpengaruh pada aspek pemasaran atau tinggi rendahnya penjualan hasil komoditas setiap Balai Perikanan Budidaya Laut.

Penerimaan PNBP BPBL Ambon pada tahun 2024 mencapai 17,52% dari target yang telah ditetapkan, hal ini didukung dengan nilai penjualan komoditas budidaya dan kegiatan pendukung lainnya.

Penerimaan PNBP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mengalami kenaikan secara bertahap jika dibandingkan penerimaan PNBP pada periode 2017. Penerimaan PNBP pada 2017 sebesar Rp. 766.519.304,- atau sebesar 120%. Hal itu menunjukan bahwa kegiatan budidaya yang dilaksanakan semakin baik dari segi perencanaan dan pencapaian targetnya.

Rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi pada LKJ periode sebelumnya adalah pelaksanaan pengawasan secara berkala telah dilakukan oleh pimpinan dan PPK terhadap divisi produksi terkait target dan strategi pencapaian PNBP pada saat rapat koordinasi bulanan yang dilakukan penentuan target perolehan PNBP setiap divisi produksi dan pelaporan perolehan PNBP pada Bendahara Penerimaan. Salah satu langkah pengendalian resiko penurunan hasil penjualan komoditas budidaya adalah dengan melakukan promosi langsung pada penjual maupun konsumen dan media sosial seperti WhatsApp terkait komoditas budidaya yang siap jual, diharapkan dengan cara seperti ini konsumen dapat

dijangkau secara lebih luas dan melakukan perencanaan produksi pada tahun 2024 secara cermat sehingga hasil produksi budidaya dapat terserap oleh pasar dan meningkatkan perolehan PNBP pada tahun berjalan.

SASARAN KEGIATAN II : MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

IKU 2 : Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan Ke Masyarakat (%)

Pada tahun 2024 secara nasional produksi rumput laut nasional ditargetkan sebesar 10,58 juta ton. Dalam mendukung nilai produksi tersebut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berusaha mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki terutama dalam proses penyediaan bibit kultur jaringan. Saat ini Laboratorium kultur jaringan rumput laut ditargetkan mampu menghasilkan 5000 planlet dimana akhir dari proses ini mengahasilkan 1500 Kg bibit rumput laut yang siap didistribusikan ke sentra sentra budidaya rumput laut di wilayah kerja.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai bulan Maret 2024 terealisasi sebesar Rp. 269.800.000,- dari pagu anggaran senilai Rp. 247.976.000 atau sebesar 91,91%.

Rumput laut Kotoni adalah salah satu komoditas unggulan dibidang perikanan dan kelautan Indonesia karena jenis rumput laut ini menghasilkan karagenan yang bernilai ekonomis tinggi. Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid dari polisakarida rantai panjang yang diperoleh dari hasil ektraksi rumput laut dengan menggunakan air panas atau larutan alkali pada temperature tinggi. Rumput laut penghasil karagenan disebut rumput laut karaginofit, yang terdiri dari jenis Kappaphycus sp, Euchema sp, Chondrus sp, Hypnea sp dan Gigartina sp. Dalam industry dan perdagangan, karagenan memberikan manfaat antara lain dalam industry farmasi, makanan, dan kosmetik sebagai stabilizer, bahan pengental (thickener), pembentuk gel (gelling agent) dan pengemulsi, (Parenrengi et.al. 2011).

Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan. Pada saat ini pengadaan bibit rumput laut masih mengalami banyak kendala diantaranya iklim laut yang tidak bisa dikendalikan. Pada musim tertentu kondisi perairan tidak cocok untuk pertumbuhan rumput laut sehingga semuanya mati atau tidak tumbuh secara optimal, sehingga pada musim tanam berikutnya menyebabkan ketersediaan bibit sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Hal ini menyebabkan penyediaan bibit secara berkesinambungan untuk peningkatan luas area budidaya belum dapat terpenuhi.

Penyediaan bibit unggul rumput laut telah dilakukan dengan cara seleksi rumpun yang memiliki laju pertumbuhan harian tinggi pada beberapa generasi penanaman, (Masak et al.2011). Bibit seleksi kemudian diperbanyak dengan metode stek kemudian disebar ke pembudidaya

rumput laut. Produktifitas penyediaan bibit unggul dengan metode stek ini belum dapat memenuhi kebutuhan pembudidaya rumput laut yang diperkirakan mencapai 1-2 juta ton per tahun.

Kultur jaringan merupakan Teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas serta menumbuhkan bagian bagian tersebut dalam media buatan secara aseptic dalam wadah tertutup sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap.

Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai beberapa keunggulan antara lain :

- Memiliki sifat identic dengan induknya
- Tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas
- Mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar
- Kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin
- Pada rumput laut, produksi bibit dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa dipengaruhi musim.
- Teknik embryogenesis somatic pada rumput laut adalah Teknik mengubah sel somatic dari talus menjadi sel embrio bipolar atau dalam rumput laut disebut sel carpospore. Teknik ini dilakukan dengan menginduksi tumbuhnya kalus dari potongan talus, kalus adalah sekelompok sel yang tumbuh tidak berdiferensiasi, sel sel kalus yang terbentuk diregenerasikan menjadi kalus embriogenik yang selanjutnya sel embrio somatic ini diregenerasikan menjadi mikropropagul kemudian menjadi planlet siap diaklimatisasi.

Tabel 6. Capaian IKU " Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT"

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Planlet)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2024**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
3000	4600	120	-	-	7100	64,79	-

Gambar 3 . Produksi Planlet Rumput Laut

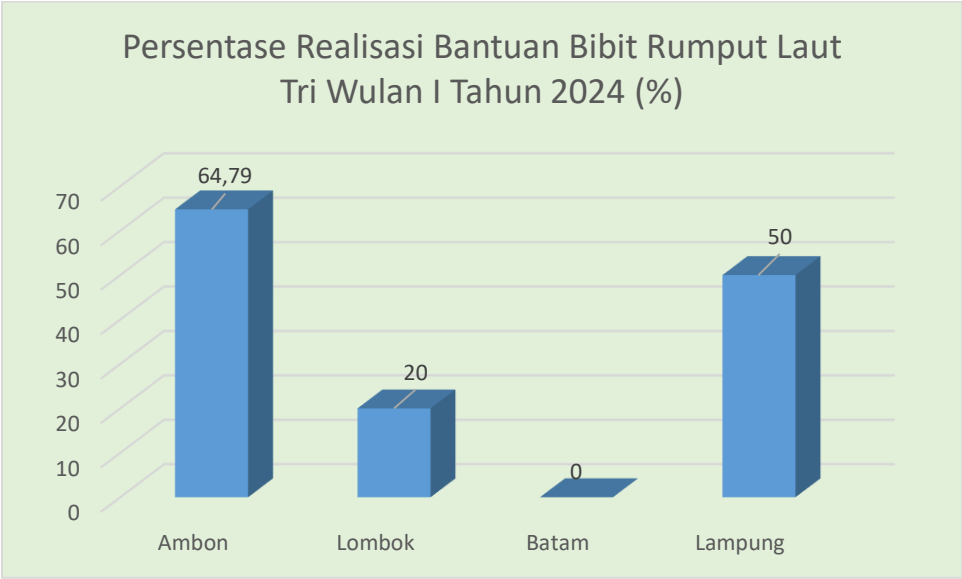

Grafik 5. Capaian IKU Produksi Bibit Rumput Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi planlet rumput laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada tahun 2024 bervariasi. Data tersebut menunjukan setiap satker dalam tahapan produksi planlet rumput laut berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu lokasi perairan memiliki karakteristik tersendiri dalam menunjang pertumbuhan rumput laut seperti tingkat pertumbuhan, respon kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi planlet rumput laut antara lain melalui peningkatan jumlah sarana kultur sehingga kultur eksplan/kalus baru dapat ditingkatkan sehingga produksi planlet skala laatorium akan meningkat. Selain itu adalah monitoring kondisi parameter perairan seperti kandungan phospat dan unsur mikro lainnya harus dalam kondisi optimal.

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi sehingga produksi dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi planlet rumput laut berkualitas, dan siap diaklimatisasi dan dibesarkan di kebun bibit. IKU ini merupakan IKU Baru sehingga pada tahun 2017 belum dapat diperbandingkan nilai produksinya.

IKU 3 : Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

Program bantuan sarana dan prasarana kebun bibit rumput laut kultur jaringan menjadi salah satu program prioritas Ditjen Perikanan Budidaya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program ini adalah IKU Ditjen Perikanan Budidaya yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan budidaya khususnya produksi rumput laut. Target atas IKU ini adalah 38 paket bantuan kebun bibit rumput laut.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai bulan Maret 2024 terealisasi sebesar Rp. 516.246.688,- dari pagu anggaran senilai Rp. 2.090.000.000 atau sebesar 24,70%.

Perkembangan usaha budidaya rumput laut harus diimbangi dengan adanya ketersediaan bibit yang cukup dan berkualitas baik dan hal ini menjadi permasalahan dalam pengembangan budidaya rumput laut. Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan, baik secara kualitas maupun kuantitas serta sarana budidaya rumput laut yang memadai.

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya merupakan suatu komitmen yang menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Jenis dan jumlah bantuan yang diberikan berupa unit kebun bibit rumput laut kultur jaringan lengkap dengan bibit, tali dan pelampung. Adapun rincian bahan untuk 1unit konstruksi kebun bibit rumput laut minimal seperti tertera pada Tabel 9.

Tabel 7. Rincian Bahan Konstruksi 1 (satu) Unit Kebun Bibit Rumput Laut

		SPESIFIKASI
A.		**Sarana Utama**
	1.	Bibit Rumput laut harus memenuhi kualifikasi sebagai bibit kultur jaringan dengan spesifikasi sebagai berikut: - Strain: Kappaphycus alvarezii/Euchema cottoni - Bibit hasil perbanyakan kultur jaringan yang dihasilkan oleh UPT DJPB atau kelompok pembibit rumput laut binaan UPT DJPB (Pada saat penyerahan barang dilengkapi dengan surat keterangan asal "ASLI" yang diterbitkan oleh UPT DJPB. - Bibit starter Euchema cottoni (sakul/maumere/tambalang) dari kelompok pembibit RL - Kesegaran: Thalus tidak berlendir dan patah - Thalus bercabang banyak - Warna: Hijau/coklat/jingga - Bersih: tidak ditempeli lumut dan organisme lainnya
B.		**Peralatan**
	1.	Tali Utama (minimal PE 12 mm)
	2.	Tali Jangkar (minimal PE 12 mm)
	3.	Tali Ris (PE 4-5 mm)
	4.	Tali Pengikat Pelampung (tali rafia atau minimal tali PE 3 mm)
	5.	Tali Pengikat Bibit (Tali Rafia/Tali Nylon/Tali PE 1 mm)
	6.	Pemberat / Jangkar (Berat min 50 kg atau kayu atau bambu yang ditancap) Untuk metode lepas dasar patok kayu (patok kayu atau bambu berdiameter minimal 5 cm)
	7.	Pelampung Utama (Styrofoam volume min 125 cm^3 atau bola berbahan PE dengan diameter min 30 cm)
	8.	Pelampung jalur (Botol HDPE 1 L atau bola dimeter minimal 10 cm
	9.	Pelampung penunjang berupa Styrofoam atau drum plastic volume min 60 cm^3 atau bola berbahan PE dengan diameter min 20 cm.

Penerima Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut pada tahun 2024, yang telah melalui tahap identifikasi dan verifikasi dan telah menerima bantuan tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Citra Mandiri	Kepulauan Sula	Maluku Utara	BAST B.789/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Maret 2024
2.	Mina mandiri	Kepulauan Sula	Maluku Utara	BAST B.789.1/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Maret 2024
3.	Pasgatel	Kepulauan Sula	Maluku Utara	BAST B.794/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Maret 2024
4.	Santosa	Kepulauan Sula	Maluku Utara	BAST B.794.1/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Maret 2024
5.	Pulau Kucing	Kepulauan Sula	Maluku Utara	BAST B.795/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Maret 2024

Tabel 9. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Bawal	Pulau Morotai	Maluku Utara	Terverifikasi
2.	Tike Laha	Pulau Morotai	Maluku Utara	Terverifikasi
3.	Kakap	Pulau Morotai	Maluku Utara	Terverifikasi
4.	Pomakirio	Pulau Morotai	Maluku Utara	Terverifikasi
5.	Tonidora	Pulau Morotai	Maluku Utara	Terverifikasi

Tabel 10. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Arfak Bay II	Kaimana	Papua Barat	Terverifikasi
2.	Somu I	Kaimana	Papua Barat	Terverifikasi
3.	Arfak Culture	Kaimana	Papua Barat	Terverifikasi
4.	Somu III	Kaimana	Papua Barat	Terverifikasi
5.	Somu IV	Kaimana	Papua Barat	Terverifikasi

Tabel 11. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kota Tual Provinsi Maluku

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Said Makmur	Tual	Maluku	Terverifikasi
2.	Talenta	Tual	Maluku	Terverifikasi
3.	Harmoko Jaya	Tual	Maluku	Terverifikasi
4.	Tunas Harapan	Tual	Maluku	Terverifikasi
5.	Jaya Bahari	Tual	Maluku	Terverifikasi

Tabel 12. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Bina Bahari	Halmahera Selatan	Maluku Utara	Terverifikasi
2.	Jaya Bakti	Halmahera Selatan	Maluku Utara	Terverifikasi
3.	Sinar Mas	Halmahera Selatan	Maluku Utara	Terverifikasi
4.	Pasir Panjang Tanjung	Halmahera Selatan	Maluku Utara	Terverifikasi
5.	Mano Jaya III	Halmahera Selatan	Maluku Utara	Terverifikasi

Tabel 13. Capaian IKU "Bantuan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Rumput Laut BPBL Ambon".

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2024**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2022 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	75	-	-

Gambar 4. Kegiatan identifikasi kelompok calon penerima bantuan sarana KBRL

Grafik 6. Capaian IKU Bantuan KBRL Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan kebun bibit rumput laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada tahun 2024 masih 0%, perhitungan pencapaian IKU ini dihitung secara semester, sesuai target yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Adanya perbedaan tata kelola dan perencanaan (kegiatan lelang) yang didukung dengan lengkap atau tidaknya data administrasi usulan kelompok calon penerima bantuan KBRL dari setiap kabupaten kota yang menjadi sentra pengembangan rumput laut, menyebabkan proses ketercapaian IKU ini setiap satker laut akan berbeda.

Pada tahun 2024 secara nasional produksi rumput laut nasional ditargetkan sebesar 10,58 juta ton. Dalam mendukung nilai produksi tersebut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berusaha mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki terutama dalam proses penyediaan bibit kultur jaringan. Saat ini Laboratorium kultur jaringan rumput laut ditargetkan mampu menghasilkan 5000 planlet dimana akhir dari proses ini mengahasilkan 1500 Kg bibit rumput laut yang siap didistribusikan ke sentra sentra budidaya rumput laut di wilayah kerja.

Gambar 5. Bibit rumput laut kultur jaringan

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi rumput laut antara lain melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang dikembangkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang memiliki beberapa keunggulan seperti memiliki sifat yang sama seperti indukan, cepatnya pertumbuhan thalus serta relative tahan terhadap penyakit, meningkatkan sarana budidaya rumput laut serta melakukan koordinasi dengan Dinas KP, Penyuluh Perikanan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait potensi pengembangan budidaya rumput di wilayah kerja.

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan laboratorium kultur jaringan rumput laut sehingga produksi planlet dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi kebutuhan bibit rumput laut kultur jaringan.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 4 : Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

Program bantuan calon induk ikan adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat mennghasilkan benih bermutu pada masyarakat pembudidaya ikan.

Tujuan bantuan calon induk ikan kepada unit pembenihan milik masyarakat (UPR/HSRT) untuk meremajakan induk yang ada di masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas induk

sehingga dapat menghasilkan benih bermutu serta mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 20,06 juta ton. Menurut petunjuk teknis bantuan, Nomor 307/PER-DJPB/2022 spesifikasi teknis calon induk ikan laut adalah sebagai berikut : Kakap Putih dengan berat 300 gram.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai bulan Maret 2024 belum terealisasi dari pagu anggaran senilai Rp.6.638.000 atau sebesar 0%.

Tabel 14. Capaian IKU "Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat"

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator: Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2024**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
181	181	181	4,43	-	4090	4,43	-

IKU Bantuan Calon Induk Ikan Laut yang didistribusikan kepada masyarakat lingkup BPBL Ambon, merupakan IKU baru pada tahun 2024, dimana pada tahun 2022 BPBL Ambon belum memiliki IKU tersebut sehingga perhitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi dan penjaminan kualitas calon induk yang dihasilkan antara lain melalui penerapan *biosecurity* di lingkungan budidaya secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan yang tepat, pakan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang terkandung didalamnya. Pakan diberikan secara tepat ukuran, jumlah, frekuensi pemberian sehingga berdampak pada peningkatan survival rate calon induk ikan , dan secara umum optimalkan implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di instalasi produksi budidaya.

Gambar 6. Calon induk Ikan kakap putih (*Lates calcarifer*)

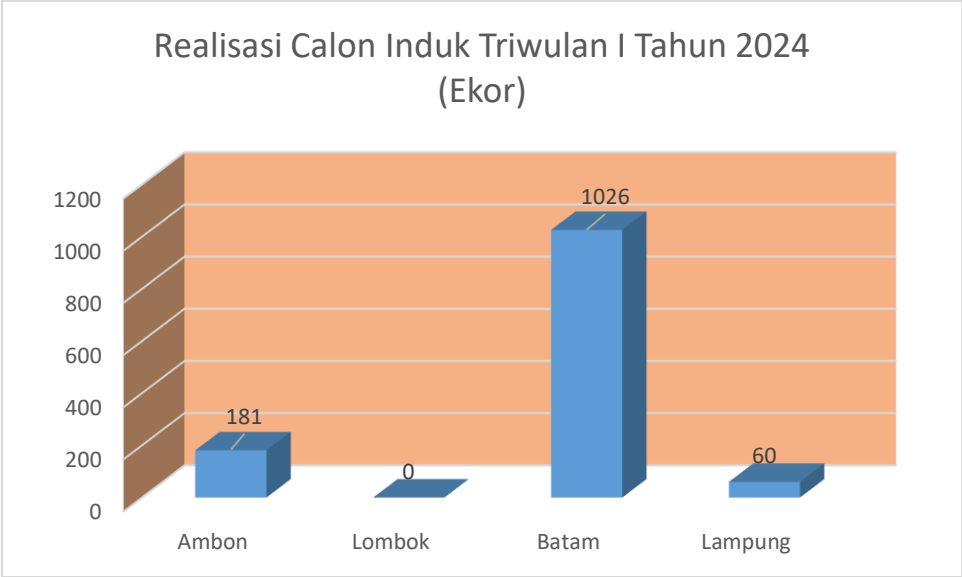

Grafik 7. Capaian IKU Bantuan Calon Induk Laut Satker Laut

IKU 5 : Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

Target jumlah bantuan benih yang harus disalurkan oleh BPBL Ambon tahun 2024 sebesar 538.000 ekor atau 100%. Dimana Perhitungan pencapaian target IKU bantuan benih dilakukan per semester dalam aplikasi kinerjaku, IKU ini dibagi menjadi 2 (dua) IKU Bantuan Benih Ikan Konsumsi dan Ikan Hias Laut. Pagu anggaran IKU Bantuan Benih Ikan Laut Rp. 9.600.000.000,- Target IKU bantuan benih ikan konsumsi pada tahun ini menjadi 538.000 Ekor.

Secara rill progress capaian Bantuan Benih sampai dengan bulan Maret 2024 ini adalah sebesar 348.600 ekor atau 64,79% dari perencanaan target yang telah ditetapkan. Bantuan Benih yang disalurkan pada triwulan pertama terdiri atas benih ikan konsumsi yang didominasi benih ikan kakap putih.

Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan pertama TA. 2024 terealisasi sebesar Rp. 463.000.000, atau sebesar 4,83% dari total pagu anggaran yang ditetapkan

Tabel 15. Capaian IKU "Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon".

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2022**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	348.600	-	100	64,79	-

Data Penerima Bantuan benih telah diproses penginputan dalam aplikasi Bantuan Pemerintah KKP, Realisasi Bantuan Benih pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan jumlah produksi benih cukup baik, untuk beberapa komoditas unggulan seperti kakap putih, kerapu dan bubara.

Berikut adalah rincian Bantuan benih ikan laut pada tahun 2024, tersaji pada tabel 8 berikut:

Tabel 16. Rincian Bantuan Benih Ikan Laut

No.	**Bantuan Benih Ikan**	**Jumlah Bantuan (Ekor)**	**Jenis Bantuan**	**Sebaran Lokasi Bantuan**
1.	Bantuan Benih Ikan Konsumsi Laut	538.000 Ekor atau (100%)	• Kakap Putih • Bubara • Kerapu Bebek	• Kota Ambon • Kabupaten Seram Bagian Barat • Kabupaten Maluku Tengah • Kabupaten Muna • Kabupaten Konawe Utara • Kabupaten Buru

Grafik 8. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan benih ikan laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada triwulan pertama tahun 2024, secara umum 4 satker laut telah melakukan proses pencapaian IKU. Perbedaan nilai realisasi bantuan benih ikan laut hal ini tentunya disebabkan perbedaan komoditas yang dikembangkan dan didistribusikan kepada masyarakat. Setiap Balai memiliki komoditas unggulan tertentu misalnya Lampung dengan cobia, Batam dengan bawal bintang, Lombok dengan kakap putih nya. Pencapaian tertinggi ada di BPBL Ambon yang dikuti oleh Batam, Lombok dan Lampung.

Secara khusus Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menguasai teknologi budidaya kakap putih dan bubara (Kuwe). Perbedaan tata Kelola komoditas akan berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai produksi benih ikan. Selain itu dalam realisasi bantuan benih juga dipengaruhi faktor non teknis seperti kelengkapan administrasi usulan permohonan bantuan dari pokdakan yang kurang lengkap atau jarak lokasi balai dan lokasi calon penerima bantuan yang terlalu jauh/akses transportasi sulit atau biaya operasional pengangkutan yang terlalu tinggi.

Pada proses produksi benih ikan konsumsi, Selain faktor lingkungan, adanya serangan pathogen juga menyebabkan masalah pada produksi benih. Pada benih kakap putih dan bubara juga ditemukan infeksi *Trichodina*. Trichodina sp. merupakan ektoparasit pada ikan air tawar maupun ikan laut. Hampir semua spesies ikan dapat terserang Trichodina sp. (Durborow 2003). Inang yang paling sering terserang Trichodina sp. biasanya berasal dari famili Cyprinidae (Afifah et al. 2014). Trichodina sp. akan mudah menginfeksi ikan jika kepadatan penebaran tinggi dan tingkat pemberian pakan yang tinggi serta kualitas air yang rendah (Durborow 2003). Predileksi

Trichodina sp. adalah permukaan tubuh, sirip dan insang (Afifah et al. 2014). Karakter morfologi, identifikasi Trichodina sp. meliputi ukuran diameter tubuh, diameter cincin dentikel, diameter adhesive disc, lebar membran dan karakter meristik yaitu jumlah dentikel (Dana et al. 2002; Anisah et al. 2016).

Zheila (2013), permukaan tubuh berhubungan langsung dengan lingkungan yang memudahkan serangan Trichodina sp., selain itu permukaan tubuh juga menjadi tempat hidup yang baik bagi ektoparasit (Zheila 2013). Menurut Pramono dan Syakuri (2008), Trichodina sp. menempel pada permukaan tubuh dan akan berputar 360o dengan menggunakan silia sehingga akan merusak sel-sel disekitar dan memakan sel RIWIDIHARSO et al. – Trichodina pada benih ikan nilem di Balai Benih Ikan Kutasari Purbalingga 323 epitel yang hancur hingga mengakibatkan iritasi pada permukaan tubuh. Tingginya kandungan bahan organik dalam kolam dapat menyebabkan tingginya jumlah patogen sehingga kulit akan mensekresi mucus yang berlebih sebagai antibodi untuk mendegradasi patogen. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kulit sehingga lebih mudah terinfeksi ektoparasit. Serangan Trichodina sp. dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan hyperplasia pada permukaan tubuh dan insang (Afifah et al. 2014). Serangan parasit ini menyebabkan hyperplasia yang dapat menyebabkan gangguan osmotik, pernapasan bahkan menyebabkan kematian. Kondisi ini mengakibatkan terhalangnya aliran air menuju filamen insang sehingga dapat menyebabkan ikan stres dan sulit untuk bernapas (Afifah et al. 2014).

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi dan penjaminan kualitas benih yang dihasilkan antara lain melalui penerapan *biosecurity* di lingkungan hatchery secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan benih yang tepat, pakan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang terkandung didalamnya. Pakan induk dan benih tepat secara ukuran, jumlah, frekuensi pemberian sehingga berdampak pada peningkatan survival rate induk dan benih, dan secara umum optimalkan implementasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di instalasi produksi budidaya. Selain itu pengoptimalan pengelolaan kualitas air dengan menjaga perputaran media pemeliharaan menjadi bagian penting dalam penanganan penyakit ikan.

Rencana aksi dalam manajemen kesehatan ikan, khususnya penanganan infeksi *Trichodina* dapat dilakukan dengan perendaman ikan dengan menggunakan fumisid 5-10 ppm selama 30 menit dan diulang jika masih terjadi infeksi. Selain itu dilakukan penambahan vitamin C dalam pakan yang diberikan sampai ikan terlihat sehat, vitamin C secara umum dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh terhadap serangan penyakit.

Jumlah bantuan benih ikan laut pada 2017 sebanyak 188.300 ekor dan mengalami kenaikan signifikan di tahun 2024. Hal itu menunjukan bahwa penguasaan teknologi budidaya terutama ikan ikan komoditas unggulan seperti kakap putih, bubara dan kerapu semakin baik

sehingga produksi dapat ditingkatkan dan realisasi bantuan kepada masyarakat juga semakin merata di wilayah kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Gambar 7. Kegiatan penyaluran bantuan benih ikan

IKU 6 : Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor)

Produksi calon induk ikan adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu pada masyarakat pembudidaya ikan.

Tabel 17. Capaian IKU " Produksi Calon Induk Ikan Laut yang diproduksi BPBL Ambon"

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Jumlah Calon Induk Ikan Laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2024**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023(%)**	**Target 2024**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
100	181	120	181	80,12	2234	17,86	18,13

Pada tahun 2024, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon juga ditargetkan memproduksi induk/calon induk unggul sebanyak 4090 ekor. Sampai akhir triwulan pertama tahun 2024 capaian produksi calon induk teralisasi 181 Ekor, produksi calon Komoditas induk yang

diproduksi oleh BPBL Ambon meliputi jenis ikan konsumsi dan ikan hias. Produksi induk unggul ikan konsumsi yaitu kakap putih dan bubara. Sedangkan produksi induk unggul ikan hias yaitu ikan hias *clownfish* dengan berbagai varian.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan bulan Maret 2024 terealisasi sebesar Rp. 767.087.000 dari pagu anggaran senilai Rp. 1.093.094.000 atau sebesar 70,18 %.

Berikut adalah rincian produksi calon induk yang dihasilkan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon triwulan pertama tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 20 berikut:

Tabel 18. Rincian Produksi Calon Induk Unggul

No.	Komoditas	Jumlah Komoditas
1.	Kakap Putih	30 ekor dengan bobot tubuh minimal 500 gr/ekor
2.	Clownfish	131 Ekor dengan ukuran minimal 4 cm.
3.	Kuwe,	20 ekor dengan bobot tubuh minimal 500 gr/ekor
4.	Kerapu	-

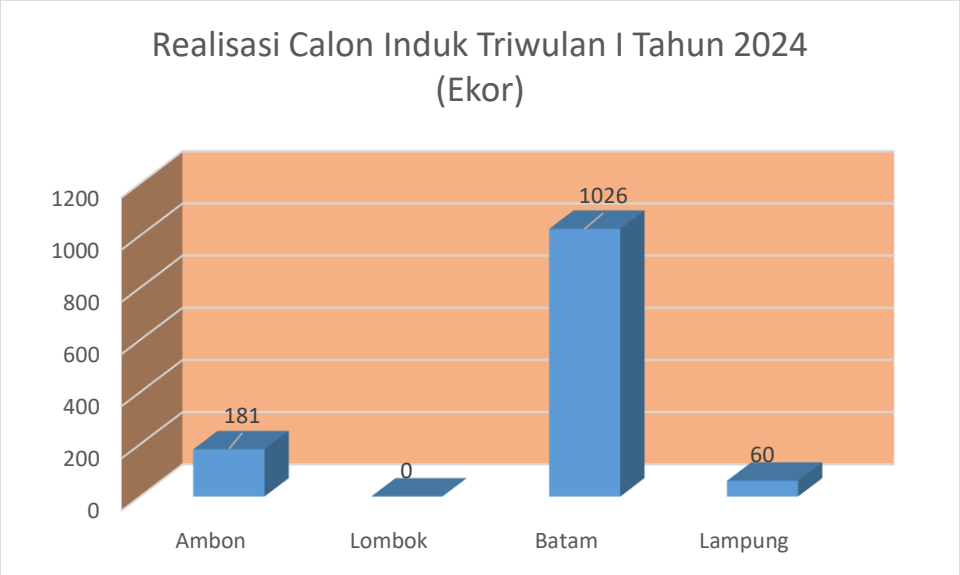

Grafik 9. Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi calon induk ikan pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada tahun 2024 berbeda beda, produksi calon induk ikan pada triwulan pertama tahun 2024 tertinggi dihasilkan oleh BPBL Batam dengan jumlah 1026 Ekor. Sementara itu BPBL Ambon mampu memproduksi sebanyak 181 Ekor calon induk dan BBPBL Lampung 60 ekor dan BPBL Lombok belum ada produksi. Data tersebut menunjukan setiap satker telah melaksanakan produksi calon induk berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola budidaya yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu perbedaan jenis komoditas budidaya yang

dikembangkan berpengaruh pada jumlah calin yang diproduksi karena setiap komoditas memiliki karakteristik tersendiri seperti tingkat pertumbuhan, respon terhadap pakan hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.

Gambar 8. Calon induk Ikan Kuwe (*Caranx sp*)

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi calon induk antara lain melalui peningkatan jumlah produksi benih yang diseleksi secara ketat sehingga menghasilkan benih ikan unggul yang siap dibesarkan menjadi calon induk. Telah dilakukan Grading secara teratur guna menekan tingkat kanibalisme ikan selama proses pemeliharaan. Mengatur pola pakan yang tepat (mencukupi) dengan melakukan pemberian pakan dengan jenis pakan buatan (pabrikan) dan pakan segar (ikan rucah) yang relative lebih murah.

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi calon induk sehingga produksi dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi calon induk yang berkualitas, dan mampu menghasilkan benih ikan yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Realisasi capaian produksi calon induk pada tahun 2017 sebanyak 2035 ekor dan pada triwulan pertama tahun 2024 sebanyak 181 ekor. Hal ini disebabkan perubahan target pada setiap periode, sehingga capaian nya bervariasi namun secara keseluruhan, target produksi calon induk BPBL Ambon telah sesuai target yang telah ditetapkan.

IKU 7 : Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

Diseminasi teknologi merupakan suatu proses penyebaran teknologi kepada pengguna, sehingga teknologi yang dihasilkan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian, diseminasi teknologi tidak dapat dipisahkan dari penelitian dan pengkajian pertanian. Secara sederhana di lingkup kerja masing-masing, dapat dipertanyakan manfaat teknologi pertanian yang proses perakitannya telah menelan banyak biaya. Besar kecilnya manfaat tersebut tidak dapat dilepaskan dengan diseminasi paket teknologi.

Dalam suatu keadaan, suatu perubahan yang kecil dan sederhana dalam budidaya perikanan mungkin merupakan tindakan paling strategis dalam menghilangkan berbagai hambatan serta dalam meletakkan landasan bagi pembangunan. Suatu diseminasi teknologi perikanan budidaya dilakukan secara bertahap, maka jumlah teknologi yang didiseminasikan harus terbatas. Kalau jumlah teknologi terbatas, pembudidaya dapat memilih teknologi yang mampu menggabungkan antara kesederhanaan dan risiko yang rendah dengan tambahan produksi yang cukup berarti. Dengan cara demikian akan dicapai tingkat keberhasilan kegiatan diseminasi yang tinggi dan secara otomatis akan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini terealisasi sebesar Rp. 399.998.560 dari pagu anggaran senilai Rp. 400.000.000, atau sebesar 100%. Target IKU layanan diseminasi pada tahun 2024 adalah 100% yang terbagi menjadi 4 kali kegiatan.

Berikut adalah rekapan kegiatan layanan diseminasi teknologi perikanan budidaya pada tahun 2024 :

Tabel 19. Rencana Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya tahun 2024

NO	JUDUL KEGIATAN DISEMINASI	ANGGOTA KOMISI IV DPR RI	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Laut di Kabupaten Buru Provinsi Maluku	SAADIAH ULUPUTTY, S.T	Telah dilaksanakan dengan 120 Orang peserta
2	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan di Kota Ambon Provinsi Maluku	ABDULLAH TUASIKAL, M.Si	Telah dilaksanakan dengan 120 Orang peserta
3	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua	H. SOLAEMAN L. HAMZAH	Telah dilaksanakan dengan 100 Orang peserta
4	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Laut di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara	ALLIEN MUS, S.H	Telah dilaksanakan dengan 100 Orang peserta

Tabel 20. Capaian IKU "Layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya Bidang Pembesaran Ikan (Unit)".

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
400	420	420	110	-	100	110	-

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya antara lain melalui koordinasi intensif dengan TA Anggota Komisi IV DPR RI di wilayah kerja terkait pelaksanaan kegiatan bimtek bagi pembudidaya di wilayah konstituen, sehingga proses diseminasi infomasi teknologi budidaya dapat tersampaikan secara efektif.
IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

Gambar 9. Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan

IKU 8 : Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawat dan Laut yang Dimanfaatkan (%)

Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan meningkatnya fenomena kenaikan kebutuhan pangan masyarakat yang aman dikonsumsi serta upaya dalam peningkatan gizi masyarakat. Usaha

budidaya nila memiliki prospek yang menjanjikan, komoditas ini mudah untuk dibudidayakan dan termasuk komoditas yang diminati oleh pasar.

Melalui penerapan teknologi adaptif, aplikatif efektif dan efisien maka penerapan system budidaya dengan bioflok dinilai mampu untuk meningkatkan produksi ikan. Pada tahun 2024 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kembali mendapat tugas untuk mendistribusikan bantuan sarana produksi ikan sistem bioflok sebanyak 20 paket yang tersebar di beberapa provinsi di wilayah kerja.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 463.000.000 dari pagu anggaran senilai Rp. 9.600.000.000 atau sebesar 4,83%. Target IKU bantuan sarana bioflok pada tahun 2024 terealisasi 100% adan sampai akhir triwulan pertama tahun 2024, kegiatan identifikasi dan verifikasi telah dilakukan di beberapa provinsi.

Tabel 21. Capaian IKU "Bantuan Sarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok BPBL Ambon".

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	100	-	-

Rendahnya capaian untuk IKU ini dikarenakan lamanya rekomendasi Usulan Calon Penerima Calon Lokasi dari anggota dewan DPR RI Komisi IV yang dapilnya berada di wilayah kerja BPBL Ambon. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya percepatan realisasi bantuan sarana budidaya ikan system bioflok antara lain melalui koordinasi intensif dengan pihak anggota dewan, pihak dinas dan pihak ketiga (kontraktor) dalam hal percepatan pelaksanaan pekerjaan di lokasi penerima bantuan. pekerjaan fisik, penyediaan sarana pendukung budidaya dikoordinasikan dengan baik sehingga barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditentukan.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 9 : Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

Target jumlah bantuan benih yang harus disalurkan oleh BPBL Ambon tahun 2024 sebesar 538.000 ekor. Yang terbagi menjadi 2 IKU Bantuan Benih Ikan Konsumsi dan Ikan Hias

Laut. Target IKU bantuan benih ikan hias laut pada tahun ini sebanyak 20.000 Ekor. Capaian Bantuan benih ikan hias laut ini pada triwulan pertama adalah sebanyak 1.000 ekor atau 5 % dari target yang telah ditetapkan, namun perhitungan pencapaian IKU dilakukan setiap semester sesuai dengan aplikasi kinerjaku. Bantuan Benih yang disalurkan pada tahun 2024 terdiri atas benih ikan hias yang didominasi benih ikan clownfish.

Tabel 22. Capaian IKU "Bantuan Benih Ikan Hias Laut BPBL Ambon".

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	100	-	-

Dalam proses pencapaian target IKU bantuan benih ikan hias laut, dukungan anggaran tidak dialokasikan secara khusus namun pada pelaksanaannya digabungkan dengan kegiatan bantuan benih ikan laut yang didistribusikan ke masyarakat di wilayah kerja. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU bantuan benih ikan laut ini pada triwulan pertama TA. 2024 terealisasi sebesar Rp. 895.380.000, atau sebesar 29,11% dari total pagu anggaran yang ditetapkan

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya pencapaian target IKU bantuan ikan hias laut adalah menambah koleksi indukan berbagai varian yang diseleksi secara ketat sehingga menghasilkan benih ikan hias unggul yang siap dibantukan kepada masyarakat, maupun sebagai salah satu sumber perolehan PNBP bidang produksi.

Rencana aksi dalam upaya mempercepat capaian kinerja adalah dengan meningkatkan sarana produksi benih ikan hias, sehingga volume kegiatan pembenihan dapat ditingkatkan dan produksi benih ikan hias akan mencukupi dalam memenuhi kegiatan bantuan maupun restocking di perairan.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

Grafik 10. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Hias Laut

Gambar 10. Bantuan Benih Ikan Hias Laut 2024

IKU 10 : Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Unit)

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok pembudidaya ikan serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah melalui bantuan prioritas yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Pada tahun 2024, terdapat IKU yang mewadahi kegiatan rehabilitasi fasilitas produksi yang dilaksanakan di BPBL Ambon. Upaya peningkatan sarana dan prasarana produksi di BPBL Ambon memiliki tujuan mendukung naiknya nilai produksi komoditas budidaya, diharapkan dengan peningkatan produksi, distribusi penyaluran bantuan prioritas dari BPBL Ambon kepada kelompok pembudidaya ikan di wilayah kerja dapat terealisasikan dengan baik.

Tabel 23. Capaian IKU "Prasarana Produksi yang direhabilitasi BPBL Ambon".

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Unit)							
TRiwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2022 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	100	-	-

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU sarana UPT yang direhabilitasi ini sampai dengan bulan Maret 2024 terealisasi sebesar Rp. 454.904.075 dari pagu anggaran senilai Rp. 1.500.000.000, atau sebesar 30,33 %.

Secara umum kegiatan rehabilitasi UPT di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahapan proses pelaksanaan.

Belum ditemukan adanya permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini karena semua tahapan pekerjaan dilakukan sesuai dengan perencanaan.

Rencana aksi untuk kegiatan IKU sejenis adalah melakukan identifikasi kebutuhan rehabilitasi sarana produksi yang dibutuhkan sehingga target yang diinginkan dapat tepat sasaran dan mampu mendukung kegiatan produksi dengan baik.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

SASARAN KEGIATAN III : MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA BIDANG KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN DI WILAYAH KERJA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

IKU 11 : Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

Salah satu faktor penyebab gagalnya usaha budidaya ikan adalah terjadinya kejadian penyakit pada ikan budidaya, penyakit ikan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar dengan mortalitas tinggi. Penyakit ikan adalah segala bentuk penyimpangan yang dapat menyebabkan ikan merasa terganggu kehidupanya. Atau dapat diartikan sebagai suatu keadaan

fisik, kimia, biologis, morfologi dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal yang disebabkan factor internal atau eksternal.

Penyebab penyakit dapat berasal dari dalam tubuh ikan maupun luar. Faktor internal antara lain akibat keturunan (genetic), seksresi internal, imunodefisiensi, kelainan saraf atau gangguan metabolik. Sedangkan faktor eksternal antara lain: serangan pathogen, hama, lingkungan atau malnutrisi.

Upaya pengendalian hama dan penyakit ikan yang biasa dilakukan oleh pembudidaya adalah upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif adalah tindakan yang sebaiknya dilakukan pembudidaya untuk mengatasi serangan penyakit. Upaya kuratif atau pengobatan adalah upaya yang dilakukan pembudidaya untuk mengatasi penyakit ikan dengan menggunakan obat baik yang bersifat alami maupun sintetis. Pengobatan diberikan berdasarkan jenis penyakit, pathogen dan dosis tertentu.

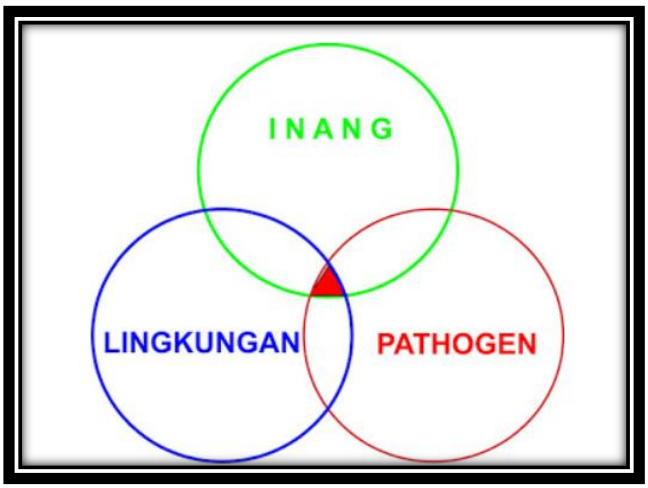

Gambar 11. Diagram Kejadian Penyakit Ikan

Hingga akhir triwulan pertama tahun 2024, capaian kinerja pada IKU pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan mampu melebihi target yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon mencapai 472 sampel atau 58,93% dari total target sampel uji di tahun 2024.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan pertama tahun 2024 Anggaran pengujian sampel dengan pagu Rp. 294.778.000 dan belum terealisasi.

Tabel 24. Capaian IKU "Sampel yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBL Ambon".

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan dan kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2024**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
25	58,93	120	58,93	62,68	100	58,93	38,61

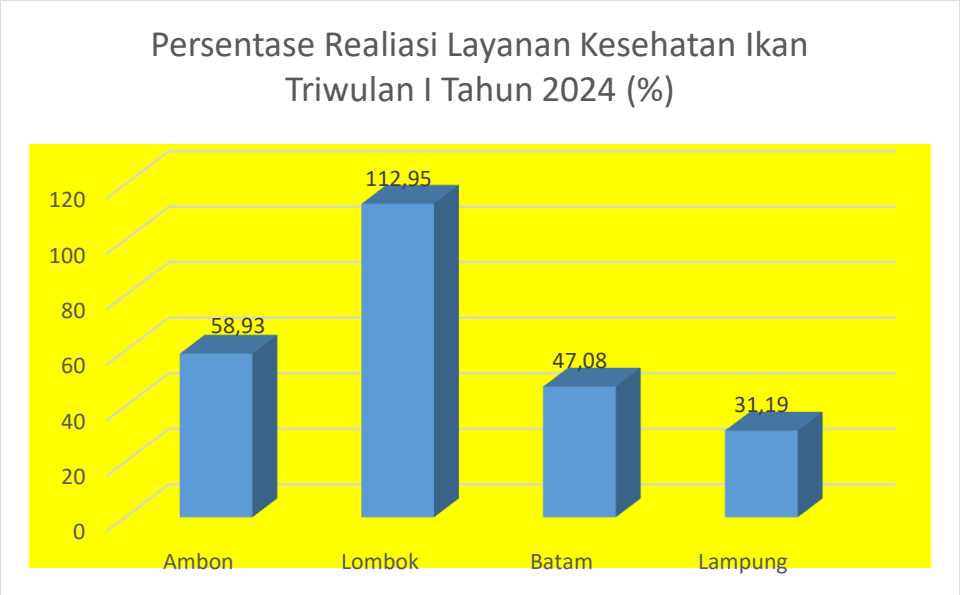

Grafik 11. Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut

Hasil identifikasi menunjukan terjadi kejadian serangan penyakit yang disebabkan oleh parasit, bakteri dan virus pada beberapa komoditas yang dibudidayakan seperti ikan Bubara, Kakap putih dan Kerapu Cantang. Pemeriksaan laboratorium menunjukan ikan terinfeksi parasite *Trichodina.*

Trichodina berperan besar dalam penurunan kekebalan tubuh ikan. Trichodiniasis akan menunjukan gejala klinis seperti berenang abnormal, frekuensi pernapasan meningkat, melanosis, pertumbuhan menurun. Kematian terjadi karena ikan memproduksi lendir secara berlebihan dan akhirnya kelelahan. Kematian biasanya terjadi akibat terganggunya sistem pertukaran oksigen karena dinding lamella insang tertutup oleh lendir.

Pengendalian serangan Trichodina dilakukan dengan mempertahankan kualitas air dan suhu berada pada kisaran 29^{0}C. Meningkatkan Frekuensi pergantian air untuk mengurangi kandungan bahan organic sehingga kualitas media budidaya dapat dipertahankan tetap dalam kondisi baik.

Vibriosis merupakan penyakit yang potensial menyerang ikan laut baik ikan budidaya maupun ikan liar. Dalam keadaan normal bakteri vibriosis spp merupakan microflora yang hidup pada usus ikan air laut. Kematian yang diakibatkan mencapai 50% terutama jika menginfeksi ikan stadia muda. Gejala klinis menunjukan ikan anorexia, warna tubuh menjadi lebih gelap, warna insang menjadi pucat. Pada infeksi akut bagian pectoral membengkak luka pada kulit dan bernanah. Penanggulangan infeksi ini dapat dilakukan dengan vaksinasi ikan untuk menambah ketahanan tubuh terhadap serangan infeksi ini.

Gambar 12. Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel adalah meningkatkan sarana pelayanan pengujian serta melakukan kunjungan langsung ke kawasan kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diiujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2017 sebanyak 1379 sampel dan meningkat pada tahun 2023 secara signifikan. Pengujian sampel ini bersifat eksternal dan internal sehingga dalam proses pencapaian IKU dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan.

IKU 12 : Persentase sampel Survaillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

AMR adalah kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi dan parasit menjadi resisten atau kebal terhadap antimikroba (antibiotik, antivirus, antifungal, antiparasit) yang sebelumnya efektif untuk mencegah atau membunuh mikroorganisme tersebut.

Intermediet adalah suatu keadaan dimana terjadi pergeseran dari keadaan sensitif ke keadaan yang resisten tetapi tidak resisten sepenuhnya. Sedangkan resisten adalah suatu keadaan dimana mikroba sudah peka atau sudah kebal terhadap antibiotik.

Antibiotik bekerja secara sitostatik atau sitotoksik untuk menghilangkan mikroorganisme. Antibiotik mempunyai mekanisme kerja menghambat proses sintesis protein sel bakteri, asam deoksiribonukleat/DNA dan ribonukleat asam/RNA (Zaman et al., 2017). Antibiotik bersifat toksik secara selektif pada bakteri, namun tidak toksik pada sel inang (host). Antibiotik pada peternakan digunakan dengan tujuan: sebagai pengobatan, metaphylactic, prophylactic dan pemacu pertumbuhan (Noor dan Poeloengan, 2004). Pelarangan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan dikompensasi dengan meningkatnya penggunaan sebagai metaphylactic dan prophylactic (Woolhouse et al., 2015). Dosis yang diserap atau dimetabolisme oleh individu hewan atau orang, berkisar 10- 80%, dengan sisanya diekskresikan sebagai senyawa aktif melalui urin dan kotoran ke lingkungan yang dapat mengandung mikroorganisme resisten dan gen resistensi antimikrob (FAO 2018). Resistensi adalah kemampuan bakteri untuk beradaptasi terhadap paparan antibiotik (Spellberg et al., 2013). Sifat ini merupakan suatu mekanisme alamiah untuk bertahan hidup. Penyebab utama kejadian resistensi adalah karena penggunaan antibiotik yang tidak bijak pada manusia dan hewan. Dampak dari resistensi antibiotik adalah upaya pengobatan menjadi lebih sulit dan membutuhkan biaya kesehatan yang lebih tinggi (Noor dan Poeloengan, 2004). Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tidak terkendali merupakan sebab utama penyebaran resistensi antibiotik secara global, sehinga terjadi bakteri yang multiresisten terhadap sekelompok antibiotic.

Infeksi oleh bakteri yang telah resisten mengakibatkan pengobatan menjadi tidak efektif sehingga infeksi terus berlanjut dan meningkatkan risiko penyebaran infeksi ke orang lain (WHO 2016). Gen resisten dapat diwariskan atau dapat diperoleh dari unsur genetik seluler seperti plasmid yang dapat terjadi antar bakteri (Read dan Woods, 2014). Konsentrasi antibiotik dosis rendah (subterapeutik) dapat meningkatkan perkembangan resistensi antibiotik dengan memicu perubahan genetik (Ventola 2015).

Isolat dari sampel ikan kemudian dilanjutkan dengan pengujian antimicrobial susceptibility testing (AST) yang bertujuan untuk menguji kepekaan antibiotik.

Tabel 25. Capaian IKU "Sampel yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBL Ambon".

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan dan kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase sampel Survaillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2024**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
35	12	12	34,29	-	100	34,29	-

Hingga akhir triwulan pertama tahun 2024, capaian kinerja pada IKU pengujian sampel AMR belum melebihi target yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon baru mencapai 12 sampel atau 34,29% dari total target sampel uji di tahun 2024.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan pertama tahun 2024 Anggaran pengujian sampel dengan pagu Rp. 31.075.000 dan belum terealisasi pada Triwulan I.

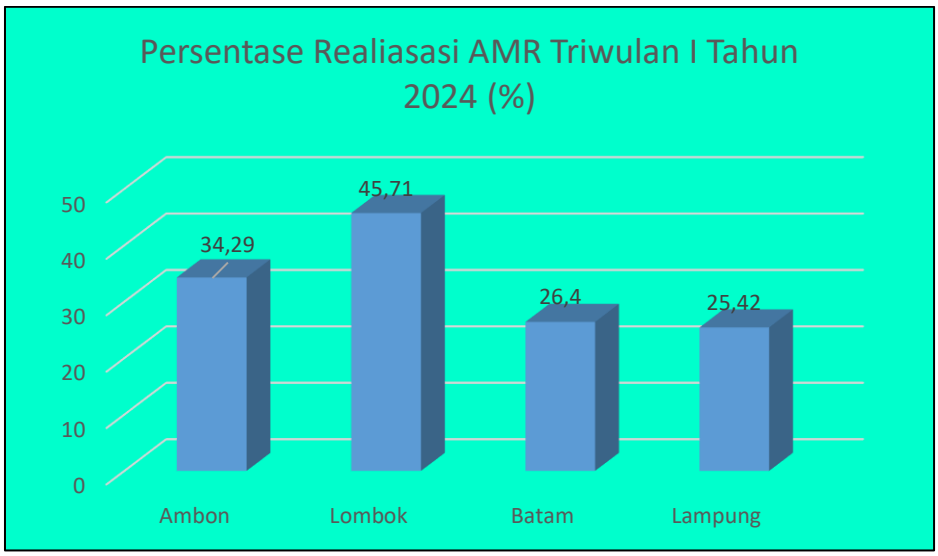

Grafik 12. Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel AMR adalah meningkatkan sarana pelayanan pengujian serta melakukan kunjungan langsung ke kawasan kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diiujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2017 belum ada, IKU ini merupakan IKU baru sehingga belum dapat dibandingkan nilai capaiannya.

SASARAN KEGIATAN IV : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

IKU 13 : Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan budidaya, salah satu pendorong utamanya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. Di samping itu, SDM juga merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, kompeten, serta memiliki daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh sebab itu, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional.

SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (*attitude*) dan kapasitas (*skill*) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Pengangkatan seorang pegawai di dalam jabatan struktural diharapkan sesuai dengan kompetensinya sehingga prinsip *the right man and the right place* dapat terpenuhi.

Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan agregasi dari indeks kompetensi (membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/*assessment* dari asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-SJ/2014), persentase capaian output SKP, persentase tingkat kehadiran dan kepatuhan pejabat terhadap LHKPN/LHKASN, serta data tambahan berupa persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan nilai *Human Capital Development Plan* (HCDP).

Tabel 26. Capaian IKM "Indeks Profesionalitas ASN BPBL Ambon".

Saasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	85	-	-

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Bimbingan Teknis memiliki pengertian sebagai sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Seiring dengan jaman yang terus berkembang, Bimbingan Teknis atau Bimtek memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa tujuan dari Bimbingan Teknis Secara Umum, meliputi Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia, Koordinasi yang lebih baik, Peningkatan kinerja institusi dan organisasi untuk menunjang keberhasilan suatu institusi, Memiliki kompetensi untuk secara optimal melaksanakan tugas jabatan yang didudukidan Memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.

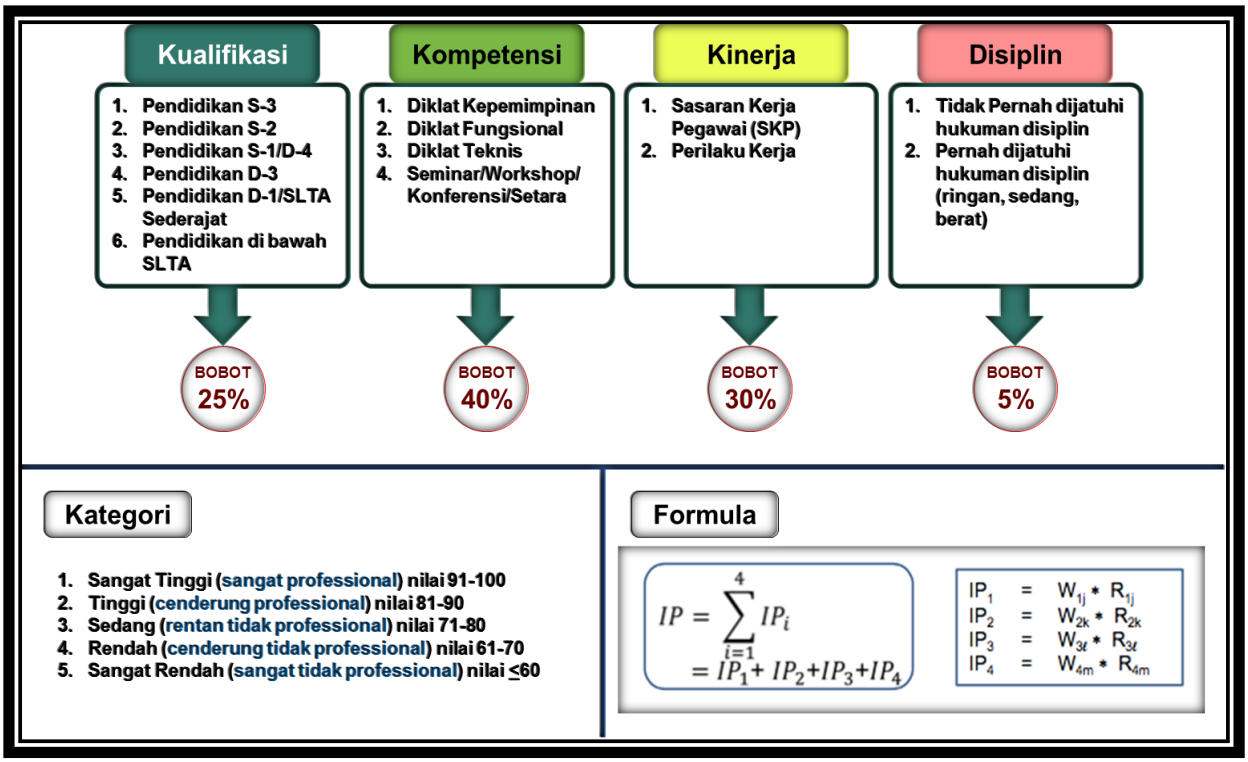

Gambar 13. Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Gambar 14. Sertifikat Kegiatan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Grafik 13. Capaian IKU IP ASN Satker Laut

Dalam proses pencapaian target IKU IP ASN, dukungan anggaran tidak dialokasikan secara khusus, karena pada saat ini peningkatan IP ASN dapat dilakukan secara daring seperti Bimtek, Seminar maupun Workshop melalui zoom meeting. Perhitungan IKU IP ASN ini dilakukan setiap semester.

Indeks Profesionalitas ASN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 2024 pada akhir triwulan pertama mencapai 63,98 (Kategori Rendah) hal ini didukung dengan terpenuhinya data dukung dari 4 kategori yakni kualifikasi Pendidikan, kompetensi mencakup kegiatan diklat, seminar, bimbingan teknis maupun workshop yang diikuti oleh pegawai, kinerja mencakup terpenuhinya target dalam sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku serta tingkat kedisiplinan pegawai. Berdasarkan data http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/unker/515 komposisi nilai IP ASN BPBL Ambon adalah sebagai berikut, jumlah pegawai yang dihitung 57 pegawai dengan Kualifikasi senilai 11,96 Kompetensi senilai 21,32, Kinerja senilai 25,7 dan Disiplin senilai 5. Dibandingkan pencapaian IP ASN di beberapa satker yang sama antara lain Balai Perikanan Budidaya Laut Batam sebesar 71,27 (Kategori sedang) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 63,95 (Kategori rendah) Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 64,56 (Kategori rendah) pada periode yang sama.

Salah satu faktor tingginya perolehan IP ASN BPBL Ambon antara lain, kualifikasi atau jenjang pendidikan pegawai yang relatif sudah berada pada jenjang master, sarjana dan beberapa di jenjang Diploma dan SMA, tentunya hal tersebut mempengaruhi nilai persentase yang diperoleh, kemudian keaktifan pegawai mengikuti seminar, workshop atau bimbingan teknis baik yang berkaitan dengan fungsional maupun umum serta secara rutin menginput bukti keikutsertaan kegiatan dalam aplikasi E-Pegawai. Pelaksanaan Diklat yang terbatas tidak menjadi hambatan dalam pengembangan kompetensi pegawai, namun hal tersebut dijadikan sebuah

inputan dalam proses perencanaan kedepan dalam menyusun daftar pengembangan kompetensi SDM BPBL Ambon (Kebutuhan Diklat), sehingga setiap pegawai dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pengembangan kompetensi tentunya dengan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaannya. Selain itu inisiatif dalam melaksanakan inhouse training dengan mendatangkan narasumber dari luar juga menjadi solusi peningkatan nilai kompetensi pegawai BPBL Ambon.

Perolehan nilai SKP dan perilaku BPBL Ambon juga menunjukan hasil yang baik, bahkan beberapa pegawai menunjukan hasil sangat baik, hal ini tentunya dipengaruhi pencapaian realisasi kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Tingkat kedisiplinan pegawai juga menunjukan hasil yang baik dimana hasil presensi (kehadiran pegawai) serta tidak adanya pegawai yang mendapat hukuman disiplin pada periode ini.

Belum ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini, karena kegiatan peningkatan kompetensi pegawai saat ini bisa dipenuhi dari kegiatan kegiatan bimtek dan sejenisnya secara daring.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai sehingga indeks profesionalitas dapat ditingkatkan.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2017 senilai 80 dan meningkat pada tahun 2024 secara signifikan, yang menunjukan kualitas profesionalitas ASN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon semakin baik.

IKU 14 : Ratio pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

Media Relations menurut Dian Wardhani (2008:1) adalah aktivitas komunikasi public relations/humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance (berimbang). Adapun pendapat Lesly dalam Yosal (2011:29) mengatakan media relations sangat berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Dengan itu sebuah instansi harus memiliki hubungan media relations yang baik agar mendapat pemberitaan yang baik untuk instansinya.

Perkembangan media massa yang sangat pesat ini mempengaruhi kegiatan media relations yang dijalankan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Adapun kegiatan yang dilakukan Public Relations Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain mengamati perkembangan media, target sasaran, dan isu – isu yang berkembang di masyarakat agar dapat menentukan strategi media relations yang tepat untuk organisasinya.

Menurut standar analisis humas pada media tradisional yang dikeluarkan Institute for Public Relations (2012) Tone berita adalah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan artikel (Eisenmann, 2012). Menurut Stacks (2006), tone mengukur apa yang dirasakan oleh target audiens tentang individu, perusahaan, produk atau topik, setelah membaca/melihat/mendengar berita di media massa. Tone biasanya terbagi atas positif, netral/balanced, dan negatif. Berikut indikator penentuan sebuah tone (Eisenmann, 2012):

Tabel 27. Deskripsi Tone Berita

No.	Tone Pemberitaan	Deskripsi
1.	Positif	Peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dengan perusahaan/brand
2.	Netral	Peliputan media tidak mengandung sentimen tertentu, hanya melaporkan fakta yang ada. Dalam pemberitaan yang negatif, sebuah artikel bisa saja netral jika hanya menyuguhkan fakta tanpa ada komentar editorial. Jika perusahaan/brand berada dalam kondisi yang tidak baik, paling tidak perusahaan/brand berupaya mendapatkan peliputan yang netral.
3.	Negatif	Peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dengan perusahaan/brand.
4.	Balanced (Berimbang)	Hasil dari tone secara keseluruhan adalah berimbang.

Tabel 28. Capaian IKM "Rasio Jumlah Pemberitaan Netral positif terhadap Total Pemberitaan Sektor Perikanan Budidaya"

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Ratio pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
86	100	116	100	100	86	116	0

Proses pencapaian rasio pemberitaan dilakukan setiap triwulan berjalan dengan target 86% dan pencapaian IKU ini pada triwulan pertama adalah 100% dimana pemberitaan sub sector perikanan budidaya memiliki tendensi positif. Walaupun belum ada penggunanaan anggaran

khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan monitoring media dan mengklasifikasikan berdasarkan tendensi isu yang terjadi.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 15 : Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks)

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip sangat penting dalam pengamanan aset Institusi dan sebagai bahan pembuktian baik secara *de facto* maupun/ *de jure.*

Output tindak lanjut pengawasan arsip adalah melahirkan pengelolaan arsip baik secara fisik, isi informasi utuh dan terkoneksi secara online. Pengelolaan secara fisik dan elektronik perlu dilakukan secara komprehensif. Pengelolaan arsip butuh komitmen dari pimpinan & konsistensi pelaksana. Tindak lanjut adalah perlu sinergi & sinkronisasi dalam pengelolaan arsip daalm tingkat teknis diantara perlunya bintek-bintek pemberkasan.

Dalam pengelolaan Arsip Dinamis membutuhkan SDM, Sarana & Prasarana, dan sumber daya lain. Empat pilar pengelolaan arsip dinamis yang harus dilakukan organisasi kerja yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA, Sistem Klasifikasi Keamanan.

Tabel 29. Capaian IKM "Pengawasan kearsipan BPBL Ambon"

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	75	-	-

Proses perhitungan progress capaian IKU kegiatan ini dilakukan pada akhir tahun. Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan pengelolaan kearsipan dan mengklasifikasikan arsip berdasarkan jenis dan kebutuhan arsip.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 16 : Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)

Administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Dapat juga dikatakan, administrasi kepegawaian negara merupakan proses penyelengaraaan politik kepegawaian atau program kerja, dan tujuan

yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi kepegawaian dalam instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan. Lingkup kegiatan administrasi kepegawaian, antara lain meliputi penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Adapun tupoksi dari pengelola kepegawaian :

1. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
2. Membuat Daftar Absen dan Rekap
3. Menyusun Acara pelantikan Sumpah Jabatan.
4. Mengusulkan kenaikan Pangkat dan Jabatan.
5. Mengusulkan pensiun Pegawai / Janda.
6. Menyusun DUK PNS dan Bezeting.
7. Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
8. Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
9. Membuat Surat Kenaikan Gaji Berkala.
10. Membuat BA. Sumpah Pejabat Fungsional/Pejabat Struktural/PNS.
11. Membuat KP4 Pegawai.
12. Membuat daftar Nominatif Pegawai.
13. Mengetik Surat Keluar/SKP Pegawai/Surat Tugas.
14. Memberikan laporan kegiatan kepada atasan.

Tabel 30. Capaian IKM “Indeks Pengelolaan Kepegawaian”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Bidang Perikanan Budidaya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	4	-	-

Proses pencapaian dan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun berjalan. Belum ada penggunanaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan pengelolaan kepegawaian berdasarkan aturan yang berlaku. Rencana aksi dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan validasi data kepegawaian secara berkala dan dilaporkan secara berjenjang kepada SDMAO Eselon 1.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 17 : Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Tujuan utama budidaya perikanan adalah memproduksi biota akuatik untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, terutama protein, dan bukan pangan.

Kendala Budidaya Ikan antara lain :

- Mahalnya harga pakan.
- Susahnya Ketersedian benih yang berkualitas.
- Besarnya biaya pembuatan kolam.
- Waktu pengontrolan setiap saat.
- Pemberian pakan harus tepat waktu.
- Susah untuk beradaptasi dengan lingkungan.
- Tidak semua species ikan bisa dibudidayakan.

Kartu KUSUKA merupakan kartu identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Yang berhak memiliki kartu ini mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan hingga petambak garam.

Adapun fungsi dari dari kartu KUSUKA ini antara lain sebagai integrasi dari semua kartu identitas Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di KKP menjadi satu Kartu, integrasi satu data stakeholder KKP yang dapat digunakan lintas esselon, pemanfaatan data dengan Kementerian atau Lembaga lain, prasyarat calon penerima bantuan

Selain menjadi identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan, Kartu KUSUKA juga berfungsi sebagai basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Tak hanya itu, tapi juga pelayanan, pembinaan, serta sarana pemantauan evaluasi pelaksanaan program KKP.

Tabel 31. Capaian IKM “Pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Bidang Perikanan Budidaya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	80	-	-

Proses pencapaian dan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun berjalan. Belum ada penggunanaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan proses pendataan pelaku usaha budidaya yang merupakan calon penerima bantuan prioritas tahun 2024, berdasarkan petunjuk teknis bantuan setiap anggota atau kelompok telah terdaftar atau teregistrasi dengan kartu KUSUKA.

Rencana aksi dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan dan Dinas KP setempat terkait usulan pelaku usaha budidaya ikan harus memiliki akses KUSUKA, sehingga diharapkan setiap kelompok penerima bantuan dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah terintegrasi dengan KUSUKA KKP.
IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 18 : Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan langkah pertama dalam mewujudkan suatu system pemerintahan atau organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan reformasi birokrasi ini tidak lain adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat secara tepat, cepat dan efisien, namun pada saat pelaksanaanya sering ditemukan beberapa kendala seperti penyalahgunaan wewenang, adanya indikasi KKN dan masih lemahnya fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Grand design reformasi birokrasi tertuang pada Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 yang menjelaskan tiga sasaran utama yakni peningkatan kapasitas, akuntabilitas organisasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Untuk membantu mewujudkan tiga sasaran tersebut maka diperlukan suatu project kongkret melalui pembangunan zona integritas di setiap instansi.

Zona Integritas menurut Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan public. Sedangkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system managemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,

penataan tatalaksana, penataan system managemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas layanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang berintegritas, khususnya di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.

Tabel 32. Capaian IKM "Nilai consensus ZI lingkup BPBL Ambon (Nilai)"

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-		76	-	-

Pencapaian target ini telah dicapai pada tahun 2021, dimana BPBL Ambon telah mendapat predikat unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai perolehan 83,14. Pada tahun 2024 akan dilakukan assessment penilaian ulang dari kegiatan zona integritas di BPBL Ambon. Progress kegiatan dalam mempertahankan predikat tersebut adalah:

- Pendokumentasian kegiatan perencanaan
- Pendokumentasian kegiatan akuntabilitas kinerja
- Pendokumentasian manajemen SDM
- Pendokumentasian sistem pengawasan
- Pendokumentasian kegiatan pelayanan publik

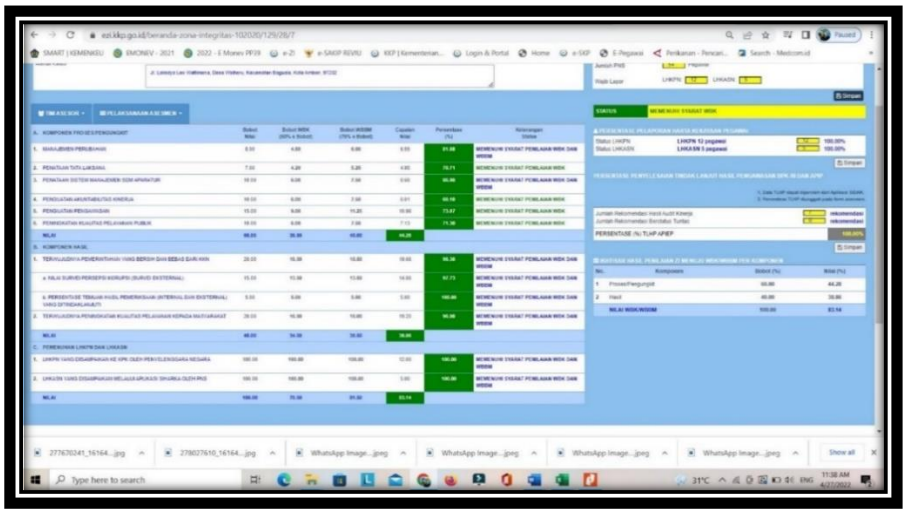

Gambar 15. Penilaian WBK dalam Aplikasi E-Zi

Belum ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini, karena kegiatan penilaian WBK saat ini bisa dipenuhi dari kegiatan pemenuhan dokumen pengungkit dan unsur persepsi masyarakat yang menjadi stakeholder Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan zona integritas dimana pemenuhan dokumen di 6 unsur penguatan serta persepsi anti korupsi dapat diperoleh dengan baik.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 19 : Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

Menurut pasal 16 UU No. 15/2004, muatan yang termasuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sendiri adalah sebagai berikut:

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
(2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
(3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
(4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun

untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan

Tabel 33. Capaian IKM "Persentase Penyelesaian LHP BPK lingkup BPBL Ambon (%) "

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-		100	-	-

Dalam proses pencapaian IKU ini belum ada anggaran khusus yang digunakan. Pencapaian IKU ini biasanya dilakukan pada akhir tahun berjalan. Tindak lanjut pelaksanaan IKU ini adalah dengan berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta menindaklanjuti segala temuan pemeriksaan dengan data dukung yang memadai.

Grafik 14. Capaian Persentase Penyelesaian LHP BPK Satker Laut

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 20 : Nilai Rekon SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)

AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodic. Yang melatar belakangi penyusunan AKIP adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tabel 34. Capaian IKM "Nilai Rekon Kinerja lingkup BPBL Ambon".

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Rekon SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023(%)**	**Target 2024**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-		82	-	-

Progress pencapaian IKU ini pada tahun 2024 mencakup:

1. Laporan Kinerja Triwulan I
2. Rencana Aksi Triwulan I
3. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I

4. Rincian Target IKU tahun 2024
5. Perjanjian Kinerja tahun 2024
6. Renja
7. Manual IKU

Dalam proses pencapaian IKU ini belum ada penggunaan anggaran secara khusus, proses difokuskan dalam pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam evaluasi SAKIP dan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan : (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2017 senilai 85 dan meningkat pada tahun 2024 ditargetkan melebihi nilai 80 yang menunjukan kualitas SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon semakin baik.

IKU 21 : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah kerja PKA meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisa data/bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan temuan audit. Adapun proses pelaksanaan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan bukti audit
- Pengujian bukti audit
- Kertas kerja audit
- Penyusunan dan temuan audit

Temuan audit adalah masalah masalah penting serta memiliki dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan audit harus mengandung unsur temuan yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh auditor, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat.

Temuan audit harus mendapatkan tanggapan dari pihak auditi.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil audit yaitu:

- Judul, mencerminkan uraian substansi temuan
- Informasi, masukan informasi yang penting dan relevan dengan temuan
- Obyektif, yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan
- Kenali pendapat penting
- Yakin
- Kalimat konstruktif, bersifat membangun dan tidak kualitatif serta untuk perbaikan dimasa datang
- Pengakuan, apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen
- Jujur
- Pengendalian manajemen, utamakan pembahasan pengendalian manajemen disetiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan
- Pengaruh negative, jelaskan pengaruh negative yang sudah terjadi
- Penyebab hakiki, tunjukan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya masalah
- Ringkas, uraian permasalahan singkat dan jelas
- Bahasa sederhana.

Tabel 35. Capaian IKM "Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Ambon (%) "

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
80	100	120	100	100	80	120	120

Grafik 15. Capaian IKU Rekomendasi Pengawasan Satker Laut

Walaupun belum ada penggunanaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun hasil capaian IKU Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Ambon pada triwulan pertama tahun 2024 sebesar 100% rekomendasi itjen telah terselesaikan seluruhnya dan satker lainnya seperti BBPBL Lampung, BPBL Batam dan BPBL Lombok pada tahun ini mencapai 100% yang artinya semua rekomendasi telah ditindak lanjuti.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 22 : Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (persen)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Pagu Anggaran Belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 29.158.797.000,-

Tabel 36. Capaian IKM "Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBL Ambon (persen) tahun 2024".

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (persen)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	93,76	-	-

Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian *output* anggaran melalui : (i) Kelancaran pelaksanaan anggaran *(pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM)*; (ii) Mendukung manajemen kas *(pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D)*; dan (iii) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) *(penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).*

Perhitungan IKU IKPA tahun 2024 dilakukan per semester dan belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini.

Tindak lanjut dari pelaksanaan IKU ini adalah penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian *output* yang benar-benar optimal.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 23 : Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (persen)

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi
    a. Capaian Keluaran

       Pengukuran capaian keluaran output program dilakukan menghitung rata rata ukur secara geometric (∏) perbandingan antara realisasi indikator dengan target indikator.
    b. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Tabel 37. Capaian IKM "Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBL Ambon (%) "

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (persen)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	86	-	-

Perhitungan progress kegiatan dilakukan setiap semester tahun berjalan. Walaupun belum ada penggunanaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini. Data kinerja anggaran BPBL Ambon mengacu pada perhitungan di tingkat eselon I. Data yang dimuat merupakan data adopsi langsung pada aplikasi Smartkeu.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan anggaran dimana pemenuhan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran guna pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dilaksanakan secara efektif dan efissien.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2017 senilai 85 dan meningkat pada tahun 2022 secara signifikan sebesar 87,34 yang menunjukan kualitas penggunaan anggaran di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon semakin akuntabel dan efisien.

IKU 23 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (persen)

Secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah. Pada sektor pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berlangsung cukup sulit. Proses yang berlangsung harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar peraturan sedikitpun.

Pengadaaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan terbilang sulit karena pembiayaannya berkaitan erat dengan APBN/APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sementara itu, pengadaan barang dan

jasa pada sektor non pemerintah atau perusahaan, proses pengadaan yang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak serumit pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- Efektif, Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- Efisien, Kegiatan pengadaan diusahakan dengan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan
- Transparan, Adanya suatu keadaan dimana pihak ketiga kegiatan pengadaan bisa melihat denga jelas barang atau jasa yang akan dibeli.
- Terbuka, Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- Bersaing, Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang yang sehat antar penyedia.
- Adil/Tidak Diskriminatif, Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu
- Akuntabel, Kegiatan pegadaan dapat ditelusur dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada berbagai pihak.

Tabel 38. Capaian IKM "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa BPBL Ambon"

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (persen)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2023**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	80	-	-

Proses pencapaian tingkat kepatuhan barang dan jasa dilakukan pada akhir tahun berjalan. Walaupun belum ada penggunanaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap mengacu pada peraturan yang diberlakukan LPSE sehingga data pengadaan barang jasa dapat dipantau dengan baik.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 24 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (persen)

Pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya

praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan. Dalam bahan ajar ini hanya akan membahas sebagian dari siklus pengelolaan BMN, yaitu tahap penatausahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian maupun pembangunan. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 39. Capaian IKM "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPBL Ambon"

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (persen)							
Triwulan I			**Realisasi Pada Triwulan I 2022**	**Perbandingan Triwulan I tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2022 (%)**	**Target 2024 (%)**	**Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)**	**Realisasi Terhadap Target Jangka Menenggah (%)**
Target	**Realisasi**	**Capaian**					
-	-	-	-	-	80	-	-

Proses pencapaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dilakukan pada akhir tahun berjalan. Walaupun belum ada penggunanaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap mengacu pada peraturan yang diberlakukan. Penginputan data di Aplikasi pengelolaan BMN sehingga data pengelolaan BMN dapat dipantau dengan baik.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN 2024 pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah sebesar Rp 33.724.991.000 Berdasarkan data dari *Online Monitoring* Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) tahun 2024, realisasi anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai bulan maret 2024 telah tercapai sebesar Rp. 6.932.077.846 atau sebesar (20,55%).

Pembagian alokasi pagu anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tersebut menurut jenis belanja yaitu: (i) Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.253.840.000 (ii) Belanja Barang sebesar Rp 22.781.151.000; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp 1.600.000.000.

Tabel 40. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Tahun 2024 dan 2023

JENIS BELANJA	TRIWULAN I TAHUN 2024*			TRIWULAN I TAHUN 2023		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	9.253.840.000	2.081.752.762	22,50	8.787.200.000	1.455.590.306	16,56
Barang	22.781.151.000	4.787.109.084	20,93	18.535.597.000	3.434.192.746	18,53
Modal	1.600.000.000	63.216.000	3,95	1.836.000.000	754.596.932	41,10
Total	**33.724.991.000**	**6.932.077.846**	**20,55**	29.158.797.000	5.644.379.984	**19,36**

Keterangan *: Data Tahun 2024 berdasarkan *update* OM-SPAN dan SMART Keuangan

Persentase anggaran belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Barang.

Penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ditujukan untuk memenuhi target beberapa program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi utama. Pada tahun 2024, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memiliki beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh anggaran yang memadai. Berikut adalah sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta dukungan anggaran:

Tabel 41. Data realisasi anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Triwulan I	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)	968.400.000	968.400.000	169.655.009	Capaian 17,52%

2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	269.800.000	247.976.000	Capaian 91,91%
		Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	2.090.000.000	516.246.686	Capaian 24,70%
		Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	6.638.000	0	Capaian 0%
		Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	3.070.132.000	2.099.753.095	Capaian 68,39%
		Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	4.090	1.093.094.000	767.087.760	Capaian 70,18%
		Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	100	400.000.000	399.998.560	Capaian 100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	75	9.600.000.000	463.000.000	Capaian 4,82%
		Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75			Termasuk dalam kegiatan bantuan benih secara umum
		Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	1	1.500.000.000	454.904.075	Capaian 30,33%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100	294.778.000	0	Capaian 0%
		Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (Persen)	100%	31.075.000	0	Capaian 0%
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	85			Belum ada Penganggaran khusus

	Budidaya Laut Ambon	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai	76			Belum ada Penganggaran khusus
		Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)	100			Belum ada Penganggaran khusus
		Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	82			Belum ada Penganggaran khusus
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)	80			Belum ada Penganggaran khusus
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	93,76			Belum ada Penganggaran khusus
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	86			Belum ada Penganggaran khusus
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80			Belum ada Penganggaran khusus
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80			Belum ada Penganggaran khusus
		Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	86			Belum ada Penganggaran khusus
		Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	75			Belum ada Penganggaran khusus
		Indeks Pengelolaan Kepegawaian	4			Belum ada Penganggaran khusus

		Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80			Belum ada Penganggaran khusus

Tabel 42. Efisiensi Anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Anggaran TW I	RO Triwulan I	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)	968.400.000	968.400.000	169.655.009	20,55% (Data Berdasarkan Nilai Efisiensi yang diperoleh dari aplikasi SmartKeungan)
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	269.800.000	247.976.000	
		Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	2.090.000.000	516.246.686	
		Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	6.638.000	0	
		Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	3.070.132.000	2.099.753.095	
		Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	4.090	1.093.094.000	767.087.760	
		Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	100	400.000.000	399.998.560	
		Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	75	9.600.000.000	463.000.000	
		Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75			

		Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	1	1.500.000.000	454.904.075	
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100	294.778.000	0	
		Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (Persen)	100%	31.075.000	0	

3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran

Berikut adalah uraian tentang evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah direalisasikan serta analisis capaian kinerja dari sasaran strategis. Pencapaian program prioritas Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon merupakan bagian sasaran kegiatan yakni pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dan Terselenggaranya pengendalian dan pegawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Efisiensi merupakan ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu, dan biaya), yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang telah ditetapkan. Akan dikatakan efisien jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal. Berdasarkan data pada :
https://monev.kemenkeu.go.id/app2024/satker/dashboard nilai efisiensi sementara Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024 sebesar 20,55%.

3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam upaya melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah melakukan beberapa upaya dalam pencapaian target kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun secara umum penggunaan anggaran 2024 menunjukan selisih cukup kecil antara nilai pagu dan realisasi anggaran.

Upaya – upaya yang telah dilakukan adalah:

- Penggunaan aplikasi media seperti ZoomUs, Google Meet merupakan aplikasi gratis dalam video conference yang dapat diaplikasikan dengan mudah, hal ini biasanya

digunakan dalam koordinasi kegiatan prioritas, maupun pelaksanaan seminar, bimtek maupun workshop bagi peningkatan kapasitas SDM BPBL Ambon.

- Mencari sumber alternatif pakan ikan (Pakan ikan segar) sehingga biaya pakan dapat ditekan.
- Melakukan perhitungan secara cermat terhadap kebutuhan bahan pendukung produksi sehingga ketersediaanya mencukupi.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target kinerja pada triwulan I tahun 2024 telah mencapai target.

4.2. Permasalahan/Kendala dihadapi

Pada tahun 2024, belum ada kendala yang berarti dalam proses pencapaian indikator kinerja utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, walaupun masih terdapat sedikit kendala teknis seperti masih ditemukannya system filterisasi media yang kurang maksimal yang berdampak pada kurang optimalnya kualitas media pemeliharaan yang siap dugunakan dalam proses pemeliharaan ikan, banyaknya kematian benih ikan, serangan ektoparasit, bakteri maupun virus, menurunnya kualitas media pemeliharaan dan terjadi blooming protozoa tertentu di perairan akibat perubahan parameter lingkungan secara signifikan namun realisasi bantuan masih dapat memenuhi target serta masih terbatasnya produksi telur dari beberapa jenis komoditas seperti kerapu bebek dan macan.

4.3. Langkah Perbaikan

Beberapa upaya telah dilakukan dalam memenuhi pencapaian target IKU yang menjadi tugas utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Langkah perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan penambahan sand filter guna meningkatkan system filtrasi media pemeliharaan pada fasilitas produksi.
- Telah dilakukan perbanyakan sarana heater sebagai bentuk antisipasi ketika terjadi penurunan suhu secara signifikan dan perbaikan sarana filtrasi media guna menekan tingginya mortalitas benih ikan.
- Telah dilakukan grading secara rutin terhadap benih ikan konsumsi seperti kakap putih, bubara dan kerapu, meningkatkan frekuensi pemberian pakan, mengurangi padat tebar sehingga kanibalisme benih dapat ditekan.

- Melakukan pengujian sampel HPI secara berkala pada semua fasilitas budidaya yang dimiliki.
- Telah dilakukan penambahan koleksi induk kerapu bebek dan kerapu macan yang berasal dari budidaya maupun tangkapan dari alam (domestikasi) sehingga produksi telur dan benih dapat ditingkatkan.
- Telah dilakukan domestikasi beberapa komoditas baru seperti amberjack dan bubara sirip biru guna meningkatkan produksi benih ikan laut unggulan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BPBL Ambon, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal laporan kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders* /mitra kerja, sehingga kontribusi BPBL Ambon dalam pembangunan perikanan budidaya dapat lebih ditingkatkan.